



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 yang hemat, cermat, efektif dan efisien, perlu adanya Analisis Standar Belanja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Kabupaten Nagan Raya untuk Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COV-ID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

15. Qanun

15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 Nomor 158);
17. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.
6. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Provinsi dan Instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
7. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

9. Anggaran

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
17. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Analisis

19. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

1. Menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; dan
4. Menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup ASB terdiri dari:

1. Standar Biaya Umum atau yang selanjutnya disingkat SBU, memuat satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
2. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK, memuat standar belanja pemeliharaan aset; dan
3. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB, memuat standar standar belanja yang membentuk aset gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

BAB IV

BAB IV PENERAPAN ASB

Pasal 5

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPK.
- (2) ASB berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi dalam rangka penyusunan RKA-SKPK dan pelaksanaan anggaran.
- (3) Rencana kegiatan SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang belum ada/belum diatur penyetaraan dalam Analisis Standar Belanja ini, dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dan ketentuan besaran total belanja dan besaran obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPK Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan komponen barang/jasa serta alokasi rincian objek belanja kegiatan yang distandarisasikan dan telah mendapat persetujuan dari TAPK.

Pasal 7

Besaran nilai standar biaya umum, harga satuan pokok kegiatan, dan analisa standar belanja sebagaimana disebut pada Pasal 4 selanjutnya lebih rinci diatur dalam Keputusan Bupati Nagan Raya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 900/509/Kpts/2021 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022; dan

b. Keputusan

b. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 954/6/Kpts/2022 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 5 Juli 2022 M
6 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 Juli 2022 M
7 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR : 431



KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR : 900/ 260 /Kpts/2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 yang hemat, cermat, efektif dan efisien, perlu adanya Analisis Standar Belanja;
 - b. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 2022 yang bahwa belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
15. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 Nomor 380);
16. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 Nomor 431);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Bupati Nagan Raya tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu digunakan untuk satuan biaya paling tinggi yang tidak boleh dilampaui baik dalam perencanaan anggaran maupun melaksanakan suatu kegiatan/sub kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022.

KETIGA.....

- KETIGA : Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari pemerintahan pusat yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik/Non Fisik), Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Bantuan Keuangan Lainnya diatur dengan standar biaya tersendiri dan dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan Bupati ini belum dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran, maka unit kerja dapat mengajukan usulan penambahan standar harga satuan kepada Bupati Nagan Raya melalui Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya dan selanjutnya akan dilakukan perubahan keputusan Analisis Standar Belanja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai standar belanja daerah untuk penanganan kasus Corona Virus Disease 19 (COVID-19) diatur khusus dengan Peraturan Bupati Nagan Raya.
- KEENAM : Keputusan Bupati dinyatakan berlaku sejak tanggal 01 Mei 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 7 Juli 2022 M
8 Dzulhijjah 1443 H


BUPATI NAGAN RAYA, 
H.M. JAMIN IDHAM, SE

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
NOMOR : 900/ 260 /Kpts/2022
TANGGAL : 7 Juli 2022

Harga satuan untuk Standar Belanja Umum (SBU) yang diatur dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan berdasarkan Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang terdiri dari :

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dan konsumsi rapat;
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
5. Satuan biaya pemeliharaan.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

A. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
2. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
3. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - 1). KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - 2). KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- b. Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- c. Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - 1). Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - 2). Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
4. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
5. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

TABEL 1
SATUAN BIAYA HONORARIUM PENANGGUNG
JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	STN	BESARAN
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	1). Nilai Pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp1.040.000
	2). Nilai Pagu dana diatas Rp100 juta s.d 250 juta	OB	Rp1.250.000
	3). Nilai Pagu dana diatas Rp250 juta s.d 500 juta	OB	Rp1.450.000
	4). Nilai Pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000
	5). Nilai Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000
	6). Nilai Pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000
	7). Nilai Pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000
	8). Nilai Pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000
	9). Nilai Pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000
	10). Nilai Pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000
	11). Nilai Pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000

NO	URAIAN	STN	BESARAN
	12). Nilai Pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000
	13). Nilai Pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000
	14). Nilai Pagu dana diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000
	15). Nilai Pagu dana diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000
	16). Nilai Pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	1). Nilai Pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp1.010.000
	2). Nilai Pagu dana diatas Rp100 juta s.d 250 juta	OB	Rp1.210.000
	3). Nilai Pagu dana diatas Rp250 juta s.d 500 juta	OB	Rp1.410.000
	4). Nilai Pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000
	5). Nilai Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000
	6). Nilai Pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000
	7). Nilai Pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000
	8). Nilai Pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000
	9). Nilai Pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000
	10). Nilai Pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000
	11). Nilai Pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000
	12). Nilai Pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000
	13). Nilai Pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	1). Nilai Pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp400.000
	2). Nilai Pagu dana diatas Rp100 juta s.d 250 juta	OB	Rp480.000
	3). Nilai Pagu dana diatas Rp250 juta s.d 500 juta	OB	Rp570.000
	4). Nilai Pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp660.000
	5). Nilai Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000
	6). Nilai Pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp880.000

NO	URAIAN	STN	BESARAN
	7). Nilai Pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp990.000
	8). Nilai Pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000
	9). Nilai Pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000
	10). Nilai Pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000
	11). Nilai Pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000
	12). Nilai Pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000
	13). Nilai Pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	1). Nilai Pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp340.000
	2). Nilai Pagu dana diatas Rp100 juta s.d 250 juta	OB	Rp420.000
	3). Nilai Pagu dana diatas Rp250 juta s.d 500 juta	OB	Rp500.000
	4). Nilai Pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp570.000
	5). Nilai Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000
	6). Nilai Pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp770.000
	7). Nilai Pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp860.000
	8). Nilai Pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000
	9). Nilai Pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000
	10). Nilai Pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000
	11). Nilai Pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000
	12). Nilai Pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000
	13). Nilai Pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	1). Nilai Pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp260.000
	2). Nilai Pagu dana diatas Rp100 juta s.d 250 juta	OB	Rp310.000
	3). Nilai Pagu dana diatas Rp250 juta s.d 500 juta	OB	Rp370.000
	4). Nilai Pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp430.000

NO	URAIAN	STN	BESARAN
5).	Nilai Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000
6).	Nilai Pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp570.000
7).	Nilai Pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp640.000
8).	Nilai Pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp810.000
9).	Nilai Pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp980.000
10).	Nilai Pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000
11).	Nilai Pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000
12).	Nilai Pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000
13).	Nilai Pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000

B. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

TABEL 2
SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	1) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	OB	Rp680.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OB	Rp850.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	Rp1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	Rp1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	Rp1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	Rp1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	Rp2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	Rp2.450.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp2.790.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp3.130.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp3.580.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp4.030.000
	2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	OB	Rp760.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OB	Rp760.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	Rp920.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	Rp1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	Rp1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	Rp1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	Rp1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	Rp2.210.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp2.520.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp2.820.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp3.230.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp3.640.000
	3) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s/d Rp50 juta	OB	Rp450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OB	Rp450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	OB	Rp450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.510.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.990.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	Rp2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	Rp2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	Rp3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	Rp3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 triliun	OB	Rp3.960.000
3	Honorarium Pengguna Anggaran		
	1). Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 100 Miliar s.d. Rp 250 Miliar	OB	Rp3.580.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 250 Miliar s.d. Rp 500 Miliar	OB	Rp4.030.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 Miliar s.d. Rp 750 Miliar	OB	Rp4.490.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 750 Miliar s.d. Rp 1 Triliun	OB	Rp4.940.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 Triliun	OB	Rp5.560.000
	2). Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 100 Miliar s.d. Rp 250 Miliar	OB	Rp3.230.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 250 Miliar s.d. Rp 500 Miliar	OB	Rp3.640.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 Miliar s.d. Rp 750 Miliar	OB	Rp4.040.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 750 Miliar s.d. Rp 1 Triliun	OB	Rp4.450.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 Triliun	OB	Rp5.010.000
	3). Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di atas Rp 10 Miliar s.d. Rp 25 Miliar	OB	Rp1.510.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di atas Rp 25 Miliar s.d. Rp 50 Miliar	OB	Rp1.750.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di atas Rp 50 Miliar s.d. Rp 75 Miliar	OB	Rp1.990.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di atas Rp 75 Miliar s.d. Rp 100 Miliar	OB	Rp2.230.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di atas Rp 100 Miliar s.d. Rp 250 Miliar	OB	Rp2.560.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di atas Rp 250 Miliar s.d. Rp 500 Miliar	OB	Rp2.880.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di atas Rp 500 Miliar s.d. Rp 750 Miliar	OB	Rp3.200.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di atas Rp 750 Miliar s.d. Rp 1 Triliun	OB	Rp3.520.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di atas Rp. 1 Triliun	OB	Rp3.960.000

C. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

1. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
2. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

TABEL 3
SATUAN BIAYA HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kepala	OB	Rp1.000.000
2	Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	Rp750.000

D. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

3. Honorarium Pembawa Acara
Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

4. Honorarium Panitia
 - a. Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
 - b. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
 - c. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan.

TABEL 4
**SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER/
PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA PANITIA**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
2	Honorarium Moderator	OK	Rp700.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
4	a. Honorarium Panitia		
	b. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	c. Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
	d. Sekretaris	OK	Rp300.000
	Anggota	OK	Rp300.000

E. Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 5 berikut ini.

**TABEL 5
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000
2	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 5 diatas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

F. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

**TABEL 6
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5

3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7
---	--	---	---	---

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
2. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
3. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Penjelasan mengenai honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah
 - 1). Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2). Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
 - c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
 - e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
 - f. Jumlah anggota tim pelaksana kegiatan per sub kegiatan maksimal anggota 30 (tiga puluh) orang dengan mempertimbangkan kewajarannya.
2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
 - a. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

- b. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- c. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
 - 1). Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
 - 2). Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

TABEL 7
SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1) Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000
	d. Wakil ketua	OB	Rp850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota:		
	JFT Ahli Muda (Gol. IV)	OB	Rp750.000
	JFT Ahli Muda (Gol. III)	OB	Rp700.000
	JFT Ahli Pertama (Gol. IV)	OB	Rp675.000
	JFT Ahli Pertama (Gol. III)	OB	Rp650.000
	JFT Ahli Pertama (Gol. II/I)	OB	Rp600.000
	THL	OB	Rp550.000
	2) Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	OB	
	JFT Ahli Muda (Gol. IV)	OB	Rp500.000
	JFT Ahli Muda (Gol. III)	OB	Rp450.000
	JFT Ahli Pertama (Gol. IV)	OB	Rp425.000
	JFT Ahli Pertama (Gol. III)	OB	Rp400.000
	JFT Ahli Pertama (Gol. II/I)	OB	Rp350.000
	THL	OB	Rp300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1) Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
	b. Anggota	OB	Rp220.000

Keterangan:

Dalam hal penentuan pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota disesuaikan dengan kebutuhan OPD masing-masing.

G. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

- a. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- b. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

TABEL 8
SATUAN BIAYA HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN
AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000
2	Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000

H. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu

wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan :

1. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
2. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
3. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
4. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
5. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

TABEL 9

**SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYULUH
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	SLTA	OB	Rp2.100.000
2	DI / DII/ DIII / Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000
3	Sarjana (S1)	OB	Rp2.600.000
4	Master (S2)	OB	Rp2.800.000
5	Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000

I. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

TABEL 10

**SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYULUH
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Rohaniwan	OK	Rp400.000

J. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan

honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
 - a. Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
 - b. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
 - c. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*
 - a. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
 - b. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

TABEL 11
SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENYUSUNAN
JURNAL/BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	1). Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
	2). Redaktur	Oter	Rp400.000
	3). Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000
	4). Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	5). Fotografer	Oter	Rp180.000
	6). Sekretariat	Oter	Rp150.000
	7). Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp200.000
2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	1). Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
	2). Redaktur	Oter	Rp300.000
	3). Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
	4). Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	5). Fotografer	Oter	Rp180.000
	6). Sekretariat	Oter	Rp150.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	7). Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000
3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	1). Penanggung Jawab	OB	Rp400.000
	2). Redaktur	OB	Rp300.000
	3). Editor	OB	Rp250.000
	4). Web Admin	OB	Rp180.000
	5). Web Developer	OB	Rp180.000
	6). Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000

K. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

TABEL 12
SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah		
	1). Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000
	2). Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	3). Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000
2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	1). Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000
	2). Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	3). Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000

L. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

TABEL 13
SATUAN BIAYA HONORARIUM PENULISAN
BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000
2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	1) Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000
	2) Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000

M. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1. Honorarium Penceramah
Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau;
 - c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

TABEL 14
SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIKLAT

NO	URAIAN	STN	BESARAN
1	Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000
2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000
3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000
4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	1) Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000

NO	URAIAN	STN	BESARAN
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000
	d. Anggota	OK	Rp300.000
2)	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp675.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000
	c. Sekretaris	OK	Rp450.000
	d. Anggota	OK	Rp450.000
3)	Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000
	c. Sekretaris	OK	Rp600.000
	d. Anggota	OK	Rp600.000

N. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

TABEL 15
SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1). Pembina	OB	Rp3.500.000
	2). Pengarah	OB	Rp3.000.000
	3). Ketua	OB	Rp2.500.000
	4). Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000
	5). Sekretaris	OB	Rp1.500.000
	6). Anggota	OB	Rp1.300.000
2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1). Ketua	OB	Rp1.000.000
	2). Sekretaris	OB	Rp900.000
	3). Anggota	OB	Rp600.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (*detasering*);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang harian;
- b. Biaya transport;
- c. Biaya penginapan; dan
- d. Uang representasi perjalanan dinas.

A. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

TABEL 16
SATUAN BIAYA UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	STN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	Aceh	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000

NO.	PROVINSI	STN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
3	Riau	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5	Jambi	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8	Lampung	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9	Bengkulu	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11	Banten	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12	Jawa Barat	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16	Jawa Timur	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17	Bali	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26	Gorontalo	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31	Maluku	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32	Maluku Utara	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33	Papua	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34	Papua Barat	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000

B. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

TABEL 17
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	STN	LUAR KOTA	LUAR KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	Pejabat Negara/Pejabat Daerah	OH	Rp250.000	Rp125.000
2	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000	Rp75.000

C. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

TABEL 18
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	STN	TARIF PENGINAPAN/HOTEL			
			BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN/ KETUA DPRK	ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONG AN IV	PEJABAT ESLN.IV/ GOL. III/ GOL. II/ GOL. I
1	Aceh	OH	Rp2.345.000	Rp1.420.000	Rp1.045.000	Rp556.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp2.650.000	Rp1.518.000	Rp1.100.000	Rp530.000
3	Riau	OH	Rp2.375.000	Rp1.375.000	Rp1.020.000	Rp852.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp2.230.000	Rp1.230.000	Rp1.037.000	Rp792.000
5	Jambi	OH	Rp2.230.000	Rp1.230.000	Rp989.000	Rp580.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp2.330.000	Rp1.330.000	Rp900.000	Rp650.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp2.200.000	Rp1.300.000	Rp991.000	Rp861.000
8	Lampung	OH	Rp2.452.000	Rp1.452.000	Rp1.070.000	Rp580.000
9	Bengkulu	OH	Rp2.071.000	Rp1.090.000	Rp880.000	Rp630.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp2.330.000	Rp1.330.000	Rp900.000	Rp622.000
11	Banten	OH	Rp2.730.000	Rp1.730.000	Rp920.000	Rp718.000
12	Jawa Barat	OH	Rp2.770.000	Rp1.770.000	Rp830.000	Rp570.000
13	D.K.I Jakarta	OH	Rp2.750.000	Rp1.490.000	Rp992.000	Rp730.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp2.752.000	Rp1.480.000	Rp954.000	Rp600.000
15	Yooyakarta	OH	Rp2.548.000	Rp1.548.000	Rp1.076.000	Rp845.000
16	Jawa Timur	OH	Rp2.452.000	Rp1.452.000	Rp1.076.000	Rp664.000
17	Bali	OH	Rp3.110.000	Rp1.946.000	Rp990.000	Rp910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp2.382.000	Rp1.382.000	Rp990.000	Rp580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp2.300.000	Rp1.300.000	Rp990.000	Rp550.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp2.430.000	Rp1.430.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp2.650.000	Rp1.650.000	Rp1.050.000	Rp659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp2.720.000	Rp1.720.000	Rp1.070.000	Rp540.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp2.758.000	Rp1.750.000	Rp1.050.000	Rp804.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp2.758.000	Rp1.750.000	Rp1.050.000	Rp804.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp2.715.000	Rp1.715.000	Rp924.000	Rp782.000

NO.	PROVINSI	STN	TARIF PENGINAPAN/HOTEL			
			BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN/ KETUA DPRK	ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONG AN IV	PEJABAT ESLN.IV/ GOL. III/ GOL. II/ GOL. I
26	Gorontalo	OH	Rp2.310.000	Rp1.210.000	Rp1.010.000	Rp764.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp2.330.000	Rp1.330.000	Rp1.075.000	Rp704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp2.300.000	Rp1.300.000	Rp1.020.000	Rp732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp2.309.000	Rp1.340.000	Rp1.020.000	Rp951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp2.475.000	Rp1.370.000	Rp1.020.000	Rp786.000
31	Maluku	OH	Rp2.330.000	Rp1.330.000	Rp980.000	Rp667.000
32	Maluku Utara	OH	Rp2.812.000	Rp1.812.000	Rp1.073.000	Rp600.000
33	Papua	OH	Rp2.560.000	Rp1.560.000	Rp1.020.000	Rp829.000
34	Papua Barat	OH	Rp2.560.000	Rp1.560.000	Rp1.020.000	Rp718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan perjalanan dinas sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dapat dibayarkan dengan menunjukkan kwitansi dari penginapan (hotel/wisma/sejenisnya).

D. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

TABEL 19
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	Banda Aceh	Denpasar	Rp10.835.000	Rp6.279.000
2	Banda Aceh	Jayapura	Rp19.167.000	Rp10.717.000
3	Banda Aceh	Yogyakarta	Rp9.765.000	Rp5.380.000
4	Banda Aceh	Makassar	Rp12.760.000	Rp6.781.000
5	Banda Aceh	Manado	Rp15.798.000	Rp7.926.000
6	Banda Aceh	Pontianak	Rp9.990.000	Rp5.840.000
7	Banda Aceh	Semarang	Rp9.530.000	Rp5.305.000
8	Banda Aceh	Solo	Rp9.530.000	Rp5.444.000
9	Banda Aceh	Surabaya	Rp10.985.000	Rp5.744.000
10	Banda Aceh	Timlka	Rp18.504.000	Rp10.076.000
11	Banda Aceh	Kendari	Rp12.953.000	Rp7.102.000
12	Banda Aceh	Palangkaraya	Rp10.546.000	Rp6.022.000
13	Banda Aceh	Balikpapan	Rp12.739.000	Rp6.749.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
14	Banda Aceh	Bandar Lampung	Rp8.225.000	Rp4.760.000
15	Banda Aceh	Banjarmasin	Rp10.792.000	Rp6.022.000
16	Banda Aceh	Batam	Rp10.439.000	Rp5.936.000
17	Banda Aceh	Biak	Rp18.718.000	Rp10.108.000
18	Banda Aceh	Malang	Rp10.204.000	Rp5.765.000
19	Banda Aceh	Mataram	Rp10.846.000	Rp6.246.000
20	Banda Aceh	Jakarta	Rp7.519.000	Rp4.492.000
21	Suka Makmue	Jakarta	Rp7.519.000	Rp4.500.000
22	Suka Makmue	Balikpapan	Rp 12.739.999	Rp6.749.000
23	Suka Makmue	Bandar Lampung	Rp 8.225.000	Rp4.760.000
24	Suka Makmue	Banjar Masin	Rp10.792.000	Rp6.022.000
25	Suka Makmue	Batam	Rp10.439.000	Rp5.936.000
26	Suka Makmue	Denpasar	Rp10.835.000	Rp6.279.000
27	Suka Makmue	Jayapura	Rp19.165.000	Rp10.717.000
28	Suka Makmue	Jogjakarta	Rp9.765.000	Rp5.380.000
29	Suka Makmue	Kendari	Rp12.953.000	Rp7.102.000
30	Suka Makmue	Makassar	Rp12.760.000	Rp6.781.000
31	Suka Makmue	Manado	Rp15.798.000	Rp7.926.000
32	Suka Makmue	Mataram	Rp10.846.000	Rp6.246.000
33	Suka Makmue	Medan	Rp3.466.000	Rp2.193.000
34	Suka Makmue	Palangkaraya	Rp10.546.000	Rp6.022.000
35	Suka Makmue	Pontianak	Rp9.990.000	Rp5.840.000
36	Suka Makmue	Semarang	Rp9.530.000	Rp5.305.000
37	Suka Makmue	Solo	Rp9.530.000	Rp5.444.000
38	Suka Makmue	Surabaya	Rp10.985.000	Rp5.744.000
39	Suka Makmue	Timika	Rp18.504.000	Rp10.076.000
40	Suka Makmue	Padang	Rp0	Rp2.290.000
41	Suka Makmue	Malang	Rp0	Rp3.800.000
42	Suka Makmue	Bandung	Rp0	Rp4.500.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 19, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - a. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - 1) Keberangkatan :
 - a) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 2. Kepulangan :
 - a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

TABEL 20
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	Orang/Kali	Rp123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	Rp232.000
3	Riau	Orang/Kali	Rp94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp137.000
5	Jambi	Orang/Kali	Rp147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp128.000
8	Lampung	Orang/Kali	Rp167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	Rp109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp90.000
11	Banten	Orang/Kali	Rp446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp166.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	Rp256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	Rp118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp194.000
17	Bali	Orang/Kali	Rp159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	Rp231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	Rp240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp171.000
31	Maluku	Orang/Kali	Rp240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp215.000
33	Papua	Orang/Kali	Rp431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	Rp182.000

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 20, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pembiayaan secara *at cost*).

3. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Ke Ibu Kota Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (*One Way/Sekali Jalan*)

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten ke ibukota provinsi/kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk rnenyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari ternpat kedudukan di kabupaten ke tempat tujuan di ibukota provinsi/kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

TABEL 21
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	KOTA		RINCIAN	
	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Suka Makmue	Banda Aceh	Orang/Kali	Rp275.000
2	Suka Makmue	Aceh Barat	Orang/Kali	Rp37.000
3	Suka Makmue	Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp126.000
4	Suka Makmue	Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp97.000
5	Suka Makmue	Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp173.000
6	Suka Makmue	Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp267.000
7	Suka Makmue	Subulussalam	Orang/Kali	Rp255.000
8	Suka Makmue	Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp184.000
9	Suka Makmue	Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp77.000
10	Suka Makmue	Bener Meriah	Orang/Kali	Rp96.000
11	Suka Makmue	Gayo Lues	Orang/Kali	Rp118.000
12	Suka Makmue	Aceh Timur	Orang/Kali	Rp149.000
13	Suka Makmue	Aceh Utara	Orang/Kali	Rp135.000
14	Suka Makmue	Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp189.000
15	Suka Makmue	Bireun	Orang/Kali	Rp238.000
16	Suka Makmue	Pidie	Orang/Kali	Rp141.000
17	Suka Makmue	Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp121.000
18	Suka Makmue	Langsa	Orang/Kali	Rp189.000
19	Suka Makmue	Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp145.000
20	Suka Makmue	Aceh Besar	Orang/Kali	Rp171.000
21	Suka Makmue	Sabang via Banda Aceh	Orang/Kali	Rp395.000
22	Suka Makmue	Sinabang via Labuhan Haji	Orang/Kali	Rp250.000

Pembiayaan tiket transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 21, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Bagi pejabat yang bepergian perjalanan dinas menggunakan Mobil Dinas harus menyertakan bukti *print out* pembelian BBM.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR DAN KONSUMSI RAPAT.

- A. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Paket *Fullboard*
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Paket *Fullday*
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan I (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. Paket *Halfday*
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. Paket *Residence*
Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
2. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan .

keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

TABEL 22
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROV.	STN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	ACEH	OP	Rp346.000	Rp403.000	Rp1.075.000	Rp749.000

TABEL 23
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	PROV.	STN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	ACEH	OP	Rp300.000	Rp330.000	Rp772.000	Rp630.000

B. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel sebagai berikut :

TABEL 24
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROV	STN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	ACEH	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

C. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau

- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

TABEL 25
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	KEGIATAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon 1/Setara	Orang/ Kali	Rp10.000	Rp49.000
2	Rapat Biasa (Wilayah Aceh)	Orang/ Kali	Rp51.000	Rp19.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

TABEL 26
KENDARAAN DINAS PEJABAT UNTUK PEJABAT ESELON II

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Wilayah Aceh	Unit	Rp515.263.000,00

TABEL 27
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU
LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.	URAIAN	STN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
1	Wilayah Aceh	Unit	Rp236.677.000	Rp371.353.000	Rp518.306.000

TABEL 28
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp360.942.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp718.252.000
3.	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp1.184.787.000

TABEL 29**KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU
LAPANGAN RODA 2 (DUA)**

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
1	Wilayah Aceh	Unit	Rp31.688.000	Rp36.486.000

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN**A. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri**

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- 1). Gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
- 2). Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

TABEL 30**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU
BANGUNAN DALAM NEGERI**

NO.	PROV	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
1	ACEH	M2/ TAHUN	Rp192.000	Rp148.000	Rp10.000

B. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan

kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1). Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2). Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

TABEL 31
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp41.900.000
2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp41.000.000
3	Pejabat Eselon II Wilayah Aceh	Unit/Tahun	Rp39.850.000

TABEL 32
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	PROV	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
1	Aceh	Unit/Tahun	Rp34.620.000	Rp37.640.000	Rp3.930.000

TABEL 33
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN
KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000
3.	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000

C. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

TABEL 34
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	Rp80.000
2.	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000
4.	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp610.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000
7.	Genset 100 WA	Unit/Tahun	Rp10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000

Keterangan singkatan :

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran


BUPATI NAGAN RAYA,
H.M. JAMIN IDHAM, SE

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
NOMOR : 900/ 260 /Kpts/2022
TANGGAL : 7 Juli 2022

Harga satuan untuk Standar Belanja Umum (SBU) yang diatur dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dengan mempertimbangkan kewajaran tingkat kemahalan regional di Kabupaten Nagan Raya untuk Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari :

1. JASA PENUNJANG ADMINISTRASI UMUM PERKANTORAN

A. Jasa Administrasi Umum Perkantoran

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1.	ADC Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK/Sekretaris Daerah/SKPK	orang/bulan	1.200.000	
2.	Petugas ATE dan Petugas Operator Genset/Wireless	orang/bulan	1.000.000	
3.	Pamtup Bupati / Wakil Bupati / Pamtup Pendopo Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRK/Wakil DPRK	orang/bulan	1.500.000	
4.	Tenaga Ahli Bupati Bidang keuangan	orang/bulan	4.000.000	
5.	Tenaga Ahli Bupati	orang/bulan	4.000.000	
6.	Tenaga Ahli Wakil Bupati	orang/bulan	3.000.000	
7.	Petugas Khusus Sekda Bidang Perbendaharaan/ Instruktur Senam/Pengaman Kantor Bupati	orang/bulan	1.000.000	
8.	Supir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK/Sekretaris DPRK/SKPK	orang/bulan	1.500.000	
9.	Staf Adm Ruang Bupati/Wakil Bupati/Sekda	orang/bulan	300.000	
10.	Petugas Pengelola Server	orang/bulan	2.500.000	
11.	Petugas Pendopo Bupati/Wakil Bupati/dan Rumah Sekda	orang/bulan	700.000	
12.	Petugas Pemadam Kebakaran	orang/bulan	1.000.000	
13.	Petugas Khusus/Lapangan BPKD	orang/bulan	1.500.000	
14.	Penterjemah/Juru Bahasa/Staf Khusus Bupati/Jubir Bupati	orang/bulan	2.000.000	
15.	Petugas Khusus Pengelola Aplikasi Keuangan Daerah	orang/bulan	5.000.000	
16.	Asisten Petugas Khusus Pengelola Aplikasi Keuangan Daerah	orang/bulan	3.000.000	
17.	Petugas Pengelola Mushalla BPKD	orang/bulan	1.000.000	
18.	Tunjangan Pengelola SP2D dan Pajak	orang/bulan	2.000.000	
19.	Tunjangan Pengelola Surat Penyediaan Dana (SPD)	orang/bulan	2.000.000	
20.	Tunjangan Pengelola dan Pengendali Anggaran	orang/bulan	2.000.000	
21.	Petugas Pengantar SP2D	orang/bulan	1.500.000	
22.	Petugas Pemungut Pajak Daerah			
	- Petugas Pemungutan PAD/PBB	orang/bulan	250.000	
	- Pengelola Kegiatan/penanggung jawab	orang/bulan	750.000	
	- Koordinator pemungut PAD/PBB	orang/bulan	500.000	

	- Koordinator lapangan pemungut PAD/PBB	orang/bulan	450.000	
	- Komando keamanan pemungut PAD/PBB	orang/bulan	750.000	
23.	Tunjangan Verifikasi Laporan Keuangan	orang/bulan	2.000.000	
24.	Penginput Gaji ASN	orang/bulan	1.000.000	
25.	Pengelola SKPP Pensiun	orang/bulan	1.000.000	
26.	Petugas Verifikasi Data Barang Milik Daerah	orang/bulan	2.000.000	
27.	Pejabat Penjual	orang/bulan	2.000.000	
28.	Tenaga Harian Lepas (THL)			
	- SMA	orang/bulan	700.000	
	- D-2	orang/bulan	750.000	
	- D-3	orang/bulan	800.000	
	- S-1	orang/bulan	900.000	
	- S-2	orang/bulan	1.000.000	
29.	Petugas Khusus Informasi Teknologi (IT)	orang/bulan	2.000.000	
30.	Pengelola Admin Aplikasi	Orang/Kali	500.000	
31.	Petugas Khusus Karhutla	orang/Hari	150.000	
32.	Petugas khusus pencegahan dan penanganan banjir	orang/Hari	150.000	
33.	Petugas Khusus Operator SIKS NG OTS (Data Kemiskinan)	orang/bulan	1.000.000	
34.	Tunjangan penganalisis dan pengkoreksi Draft Keputusan Bupati	orang/bulan	1.000.000	
35.	Petugas Khusus Pengawasan Lingkungan Hidup	orang/bulan	500.000	
36.	Petugas Pengamanan			
37.	Komandan Stapam	orang/bulan	1.300.000	
38.	Wakil Komandan Stapam	orang/bulan	1.300.000	
39.	Anggota Satpam	orang/bulan	1.200.000	
40.	Petugas Khusus Kesehatan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK	orang/bulan	5.000.000	
41.	Petugas Khusus Kesehatan Anggota DPRK	orang/bulan	4.000.000	
42.	Petugas Khusus Pendamping Fraksi/Komisi	orang/bulan	1.200.000	
43.	Tenaga Ahli Fraksi/Alat Kelengkapan DPRK/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRK	orang/bulan	5.000.000	
44.	Petugas Khusus Pengajar Lokasi Transmigrasi	orang/bulan	650.000	
45.	Petugas Pengawas Kebersihan	orang/bulan	450.000	
46.	Petugas Khusus Teknis Perkim	orang/bulan	1.500.000	
47.	Petugas Penilaian Pembentukan Operasional Kemetrolgian	Org/Kali	2.000.000	
48.	Petugas Penginput Data Base Barang Milik Daerah	orang/bulan	1.500.000	
49.	Petugas Khusus Aplikasi E-Arsip	orang/bulan	1.400.000	
50.	Petugas Khusus Penerima Berkas Perizinan (F.O)	orang/bulan	1.200.000	
51.	Petugas Pengelola Mushalla Setdakab	orang/bulan	1.000.000	

52.	Petugas Khusus Pembersih Kolam Renang Pendopo Bupati	orang/bulan	1.500.000	
53.	Petugas Verifikasi SPP dan SPM	orang/bulan	1.800.000	
54.	Petugas Administrasi SPM	orang/bulan	1.800.000	
55.	Petugas Lapangan Satpol PP & WH	orang/bulan	700.000	
56.	Petugas Pelaporan dan Perkembangan Situasi Politik Dalam Daerah	orang/bulan	2.000.000	

Keterangan :

- Penarikan Tunjangan Daerah bagi Petugas Khusus, normal penarikan per triwulan

B. Tunjangan Untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	orang/bulan	5.000.000	
2.	Pengelola Perbendaharaan Daerah	orang/bulan	4.500.000	
3.	Pembantu Pengelola Perbendaharaan Daerah	orang/bulan	1.500.000	

Catatan :

- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala BPKD merangkap PPKD
- Pengelola Perbendaharaan Daerah adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKD.
- Pembantu Pengelola Perbendaharaan Daerah adalah para Kasubbid dan staf pelaksana pada Bidang Perbendaharaan BPKD

C. Tunjangan Pengelola Aplikasi Keuangan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1.	Ketua	orang/bulan	1.500.000	
2.	Wakil Ketua	orang/bulan	1.250.000	
3.	Pelaksana	orang/bulan	1.125.000	
4.	Anggota Gol I/II/III	orang/bulan	1.000.000	
5.	Anggota Non PNS	orang/bulan	500.000	
6.	Anggota Staf IT Server	orang/bulan	750.000	

Keterangan :

- Ketua : Kepala BPKD Nagari Raya
- Wakil Ketua : Kabid Anggaran BPKD Nagari Raya
- Pelaksana : Para Analis Bidang Anggaran BPKD Nagari Raya
- Anggota : Para Staf ASN dan THL BPKD Nagari Raya

D. Tunjangan Petugas Penginput Standar Belanja Umum (SBU)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1.	Ketua	orang/kali	2.000.000	
2.	Wakil Ketua	orang/kali	1.750.000	
3.	Pelaksana	orang/kali	1.500.000	

4.	Anggota Gol I/II/III/IV	orang/kali	1.250.000	
5.	Anggota Non PNS	orang/kali	1.250.000	

Keterangan :

- Ketua : Kepala BPKD Nagan Raya
- Wakil Ketua : Kabid Anggaran BPKD Nagan Raya
- Pelaksana : Para Analis Bidang Anggaran BPKD Nagan Raya
- Anggota : Para Staf ASN dan THL BPKD Nagan Raya

E. Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Auditor di Inspektorat Kabupaten Nagan Raya

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1.	Auditor Pertama (Gol. Ruang III/a)	orang/bulan	1.000.000	
2.	Auditor Pertama (Gol. Ruang III/b)	orang/bulan	1.200.000	
3.	Auditor Muda (Gol. Ruang III/c)	orang/bulan	1.500.000	
4.	Auditor Muda (Gol. Ruang III/d)	orang/bulan	1.600.000	
5.	Auditor Madya (Gol. Ruang IV/a)	orang/bulan	1.900.000	
6.	Auditor Madya (Gol. Ruang IV/b)	orang/bulan	2.000.000	
7.	Auditor Madya (Gol. Ruang IV/c)	orang/bulan	2.100.000	
8.	Auditor Madya (Gol. Ruang IV/d)	orang/bulan	2.200.000	

F. Tunjangan Khusus Tim Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil KPPN, KPP Pratama dan Pemda

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1.	Ketua	orang/kali	2.500.000	
2.	Sekretaris	orang/kali	2.000.000	
3.	Anggota	orang/kali	1.500.000	

Keterangan :

- Ketua : Kepala BPKD Nagan Raya
- Sekretaris : Kabid Perbendaharaan BPKD Nagan Raya
- Anggota : Para Analis dan ASN Bidang Perbendaharaan BPKD Nagan Raya

G. Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pelaksana pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang belanja modalnya bernilai dari Rp0,- sampai dengan Rp50.000.000,-

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	orang/bulan	680.000	

2. Pelaksana pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang belanja modalnya bernilai dari Rp50.000.000,- sampai dengan Rp200.000.000,-

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	orang/bulan	850.000	

3. Pelaksana pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang belanja modalnya bernilai dari Rp200.000.000,- sampai dengan Rp5.000.000.000,-

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	orang/bulan	1.520.000	

4. Pelaksana pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang belanja modalnya diatas Rp5.000.000.000,-

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	orang/bulan	1.780.000	

H. Tunjangan untuk pengelola anggaran (berdasarkan pagu anggaran)

1. Jumlah nilai pagu s/d Rp5.000.000.000,-

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	orang/bulan	300.000	
2	Pembantu PPK	orang/bulan	200.000	
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	orang/bulan	300.000	
4	Pembantu PPTK	orang/bulan	200.000	
5	Pengurus Barang	orang/bulan	300.000	
6	Pengurus Barang Pembantu	orang/bulan	200.000	

2. Jumlah nilai pagu s/d Rp5.000.000.000,- s/d Rp20.000.000.000,-

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	orang/bulan	400.000	
2	Pembantu PPK	orang/bulan	200.000	
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	orang/bulan	400.000	
4	Pembantu PPTK	orang/bulan	250.000	
5	Pengurus Barang	orang/bulan	400.000	
6	Pengurus Barang Pembantu	orang/bulan	300.000	

3. Jumlah nilai pagu diatas Rp20.000.000.000,-

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	orang/bulan	600.000	
2	Pembantu PPK	orang/bulan	550.000	
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	orang/bulan	600.000	
4	Pembantu PPTK	orang/bulan	550.000	
5	Pengurus Barang	orang/bulan	900.000	
6	Pengurus Barang Pembantu	orang/bulan	500.000	

2. KEBUTUHAN PELAKSANA KEGIATAN

A. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Biaya Jasa Pihak Ke 3/Jasa Konsultasi - Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah	Paket	15.000.000	

B. Kebutuhan Pelaksanaan Diklat Dan Acara Resmi Lainnya

1) Besaran Uang Pembinaan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Tingkat Kecamatan/Perorangan			
	Juara I	Per kegiatan	1.000.000	
	Juara II	Per kegiatan	800.000	
	Juara III	Per kegiatan	650.000	
	Juara Harapan I	Per kegiatan	500.000	
	Juara Harapan II	Per kegiatan	400.000	
	Juara Harapan III	Per kegiatan	300.000	
	Juara Khusus/Favorit	Per kegiatan	250.000	
2	Tingkat Kecamatan/Kelompok(Group)			
	Juara I	Per kegiatan	1.500.000	
	Juara II	Per kegiatan	1.200.000	
	Juara III	Per kegiatan	1.000.000	
	Juara Harapan I	Per kegiatan	700.000	
	Juara Harapan II	Per kegiatan	600.000	
	Juara Harapan III	Per kegiatan	500.000	
	Juara Khusus/Favorit	Per kegiatan	400.000	

3	Tingkat Kabupaten/Perorangan			
	Juara I	Per kegiatan	1.700.000	
	Juara II	Per kegiatan	1.500.000	
	Juara III	Per kegiatan	1.200.000	
	Juara Harapan I	Per kegiatan	1.000.000	
	Juara Harapan II	Per kegiatan	750.000	
	Juara Harapan III	Per kegiatan	550.000	
	Juara Khusus/Favorit	Per kegiatan	450.000	
4	Tingkat Kabupaten/Kelompok(Group)			
	Juara I	Per kegiatan	2.000.000	
	Juara II	Per kegiatan	1.700.000	
	Juara III	Per kegiatan	1.500.000	
	Juara Harapan I	Per kegiatan	1.000.000	
	Juara Harapan II	Per kegiatan	850.000	
	Juara Harapan III	Per kegiatan	750.000	
	Juara Khusus/Favorit	Per kegiatan	500.000	
5	Tingkat Provinsi/Perorangan			
	Juara I	Per kegiatan	2.500.000	
	Juara II	Per kegiatan	2.000.000	
	Juara III	Per kegiatan	1.750.000	
	Juara Harapan I	Per kegiatan	1.500.000	
	Juara Harapan II	Per kegiatan	1.200.000	
	Juara Harapan III	Per kegiatan	1.000.000	
	Juara Khusus/Favorit	Per kegiatan	750.000	
6	Tingkat Provinsi/Kelompok(Group)			
	Juara I	Per kegiatan	3.500.000	
	Juara II	Per kegiatan	3.000.000	
	Juara III	Per kegiatan	2.500.000	
	Juara Harapan I	Per kegiatan	2.000.000	
	Juara Harapan II	Per kegiatan	1.750.000	
	Juara Harapan III	Per kegiatan	1.500.000	
	Juara Khusus/Favorit	Per kegiatan	1.000.000	

C. Pakaian Dinas /Kerja Resmi, Hari Tertentu dan Olah Raga Termasuk Atribut dan Ongkos Jahit.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	orang/stel	3.000.000	
2	Pakaian Safari	orang/stel	1.000.000	
3	Pakaian Dinas Harian (PDH)	orang/stel	700.000	
4	Baju Kopri	orang/stel	400.000	
5	Pakaian Olah Raga	orang/stel	600.000	

8	Pakaian Dinas Anggota DPRK			
	PSH Anggota DPRK	orang/stel	1.800.000	
	PSR Anggota DPRK	orang/stel	3.500.000	
	Pakaian Khas Daerah DPRK	orang/stel	3.500.000	
	PDH Lengan Panjang Anggota DPRK	orang/stel	1.800.000	

D. Satuan Biaya Program Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Program Kegiatan Kepegawaian

1) Satuan Biaya Diklat Struktural

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	DIKLAT PIM Tk. IV			
	Bantuan Diklat PIM IV	Org/Kgt	22.000.000	
2	DIKLAT PIM Tk. III			
	Bantuan Diklat PIM III	Org/Kgt	24.000.000	
3	DIKLAT PIM Tk. II			
	Bantuan Diklat PIM II	Org/Kgt	32.000.000	
4	Biaya Kontribusi peserta Prajabatan	Org/Kgt	10.000.000	
5	Biaya Kontribusi peserta Assesment	Org/Kgt	4.000.000	

Catatan :

- *) Sesuai Besaran yang berlaku pada satuan biaya Perjalanan Dinas
- ***) Sesuai Indeks Biaya yang ditentukan

2) Satuan Biaya Pendidikan (Beasiswa) Bagi PNS yang Mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar Di Lingkungan Kabupaten Nagan Raya

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Tugas Belajar *)			
	- Diploma IV / Strata 1	Orang/Tahun	15.000.000	
	- Strata 2	Orang/Tahun	20.000.000	
	- Strata 3	Orang/Tahun	25.000.000	
	- Dokter Spesialis	Orang/Tahun	35.000.000	
2	Izin Belajar **)			
	- Diploma IV / Strata 1	Orang	5.000.000	
	- Strata 2	Orang	10.000.000	
	- Strata 3	Orang	15.000.000	

Catatan :

- *) Termasuk Biaya Hidup, Biaya Operasional, uang Buku dan Referensi Beasiswa Program Gelar dan Non Gelar Dalam Negeri
- ***) Biaya Izin Belajar diperuntukan dalam Penyusunan Skripsi, Tesis dan Desertasi

E. Kebutuhan Pelatihan, Pendidikan, Seminar, Musyawarah, Sosialisasi dan Lokakarya

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Nasi Hidangan Prasmanan	porsi	50.000	
2	Nasi Kemasan	kotak	30.000	
3	Nasi bungkus	porsi	17.000	
4	Snack prasmanan	porsi	6.000	
5	Snack harian	porsi	4.000	
6	Snack kemasan	kotak	7.000	
7	Spanduk	lembar	350.000	
8	Dokumentasi	kegiatan	300.000	
9	Tas Kegiatan Terdiri Balpoint, Badge Name, Buku Tulis dan Kit Lainnya	Org/Kgt/Triwulan	200.000	
10	Koran, Majalah, Tabloid	Eks/Bulan	120.000	
11	Papan bunga - Papan bunga besar - Papan bunga kecil	Unit Unit	550.000 350.000	
12	Biaya Kontribusi BIMTEK/DIKLAT	Acara	4.500.000	
13	Uang saku peserta	Orang/hari	150.000	
14	Transportasi peserta	Orang/hari	50.000	

F. Komsumsi Harian/Rapat Dikantor

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1.	Makanan	orang/kali	17.000	
2.	Minuman	orang/kali	4.000	

G. Akomodasi dan Sewa

1) Akomodasi dan Sewa

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1.	Akomodasi	orang/hari	125.000	
2.	Sewa ruang besar	hari	500.000	
3.	Sewa ruang kecil	hari	250.000	
4.	Sewa LCD dan screen	unit/hari	150.000	
5.	Sewa Gudang/Arsip Kantor	Unit/Bulan	600.000	
6.	Sewa Teratak Besar	Unit	300.000	
7.	Sewa Teratak Kecil	Unit	200.000	
8.	Sewa kursi/Meja	Buah	10.000	
9.	Sewa Sound Sistem	Hari/Acara	500.000	
10.	Sewa Mimbar	Hari/Acara	500.000	
11.	Sewa Baju Adat/Tradisional	Set	150.000	
12.	Sewa Pelaminan	Set	2.500.000	
13.	Sewa LCD/Proyektor	Hari/Acara	500.000	
14.	Sewa Drone	Unit/Hari	500.000	

15.	Sewa Genset	Unit/Hari	300.000	
16.	Sewa Drone	Paket	346.500	
17.	Sewa GPS	Unit	247.500	
18.	Sewa Perahu	Paket	990.000	
19.	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental Dalam Wilayah Aceh			
	Roda 4	Per hari	930.000	
	Roda 6/Bus Sedang	Per hari	3.282.000	
	Roda 6/Bus Besar	Per hari	4.638.000	
20.	Sewa Ruangan/Gedung Pertemuan (sudah termasuk meja, kursi, sound system dan fasilitas lainnya)	Per hari	2.500.000	
21.	Dekorasi - Dekorasi Besar - Dekorasi Kecil	Paket Paket	1.000.000 500.000	
22.	Sewa Baju Seragam	Set	150.000	
23.	Sewa Linto/Dara Baru	Org/Kali	1.250.000	
24.	Sewa Group Seni/Tarian	Group	2.500.000	
25.	Sewa Infocus	Unit/Keg	200.000	
26.	Dekorasi Stand Pameran dalam Provinsi Aceh	Paket	8.000.000	
27.	Sewa Sarana Mobilitas Darat	Hari	5.500.000	

2) Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya

No	Uraian	Isi Silinder	Jenis/ Model	Tahun Perakitan/ Pembuatan	Harga Sewa Perbulan	Ket
1	Kendaraan Roda 4	1.000 cc	Minibus	2015 s/d 2018	5.175.000	
2	Kendaraan Roda 4	1.200 cc	Minibus	2015 s/d 2018	6.325.000	
3	Kendaraan Roda 4	1.300 cc	Minibus	2015 s/d 2018	7.475.000	
4	Kendaraan Roda 4	1.300 cc	Pick Up	2015 s/d 2018	4.600.000	
5	Kendaraan Roda 4	1.300 cc	SUV	2015 s/d 2018	6.325.000	
6	Kendaraan Roda 4	1.500 cc	Minibus	2015 s/d 2018	7.475.000	
7	Kendaraan Roda 4	1.500 cc	Pick Up	2015 s/d 2018	5.750.000	
8	Kendaraan Roda 4	1.500 cc	SUV	2015 s/d 2018	8.625.000	
9	Kendaraan Roda 4	2.000 cc	Minibus	2015 s/d 2018	8.625.000	
10	Kendaraan Roda 4	2.000 cc	Pick Up	2015 s/d 2018	6.325.000	
11	Kendaraan Roda 4	2.000 cc	SUV	2015 s/d 2018	13.225.000	
12	Kendaraan Roda 4	2.400 cc	Minibus	2015 s/d 2018	10.925.000	
13	Kendaraan Roda 4	2.400 cc	Pick Up	2015 s/d 2018	10.925.000	

14	Kendaraan Roda 4	2.400 cc	SUV	2015 s/d 2018	11.500.000	
15	Kendaraan Roda 4	2.500 cc keatas	Minibus	2015 s/d 2018	-	
16	Kendaraan Roda 4	2.500 cc keatas	Jeep	2015 s/d 2018	16.675.000	
17	Kendaraan Roda 4	2.500 cc keatas	Double Cabin	2015 s/d 2018	13.225.000	

H. Satuan Jasa Upah Dalam Kabupaten Nagan Raya

1) Jenis Tenaga Kerja Dalam Kabupaten Nagan Raya

No	Jenis Tenaga Kerja	Satuan	Standar Biaya	Ket
1.	Mandor Lapangan	Hari/Orang	148.500	
2.	Mekanik	Hari/Orang	198.000	
3.	Mekanik Pembantu	Hari/Orang	148.500	
4.	Kepala Tukang	Hari/Orang	198.000	
5.	Tukang	Hari/Orang	148.500	
6.	Operator Terlatih	Hari/Orang	247.500	
7.	Operator Kurang Terlatih	Hari/Orang	198.000	
8.	Pembantu Operator	Hari/Orang	148.500	
9.	Sopir truck	Hari/Orang	198.000	
10.	Sopir Personil	Hari/Orang	148.500	
11.	Pembantu Sopir	Hari/Orang	118.800	
12.	Buruh Lapangan Tak Terlatih	Hari/Orang	118.800	
13.	Buruh Lapangan Kurang Terlatih	Hari/Orang	99.000	
14.	Buruh Lapangan Terlatih	Hari/Orang	148.500	
15.	Cleaning Service	Orang/Bulan	750.000	
16.	Penjaga Malam	Orang/Hari	25.000	
17.	Penjaga Stand pameran	Orang/Hari	150.000	

2) Jenis Tenaga Kerja Khusus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang

No	Jenis Tenaga Kerja	Satuan	Standar Biaya	Ket
1.	Mandor	Hari/Orang	226.800	
2.	Kepala Tukang Kayu/ Cat	Hari/Orang	270.000	
3.	Tukang Kayu/ Cat	Hari/Orang	162.000	
4.	Laden Tukang Kayu/ Cat	Hari/Orang	140.400	
5.	Kepala Tukang Batu/ Besi	Hari/Orang	291.600	
6.	Tukang Bayu/Besi	Hari/Orang	162.000	
7.	Laden Tukang Batu/ Besi	Hari/Orang	162.000	
8.	Pekerja Galian Tanah	Hari/Orang	129.600	

9.	Penjaga Malam/ Satpam	Hari/Orang	270.000	
10.	Penyelam	Hari/Orang	324.000	
11.	Sopir	Hari/Orang	378.000	
12.	Operator	Hari/Orang	432.000	

I. Belanja Pemeliharaan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
11.	Pemeliharaan Alat Berat	unit/Tahun	40.000.000	
12.	Pemeliharaan Tunjangan Kesehatan			
	Bupati	Org/Tahun	120.000.000	
	Wakil Bupati	Org/Tahun	120.000.000	
13.	Pemeliharaan peralatan mesin balai industri	Per tahun	5.000.000	
14.	Pemeliharaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Tahun	10.000.000	
15.	Pemeliharaan Videotron	Tahun	25.000.000	
16.	Jasa Service/Perbaikan Alat Berat	Unit/Kali	5.000.000	

J. Biaya , Pengawasan dan Konstruksi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Pekerjaan Konstruksi			
	Pekerjaan Konstruksi K1	Paket	7.500.000	
	Pekerjaan Konstruksi K2	Paket	14.000.000	
	Pekerjaan Konstruksi K3	Paket	26.000.000	
	Pekerjaan Konstruksi K4	Paket	60.000.000	
	Pekerjaan Konstruksi K5	Paket	110.000.000	
	Pekerjaan Konstruksi K6	Paket	200.000.000	
	Pekerjaan Konstruksi K7	Paket	450.000.000	
	Pekerjaan Konstruksi K8	Paket	800.000.000	
	Pekerjaan Konstruksi K9	Paket	1.400.000.000	
	Pekerjaan Konstruksi K10	Paket	3.000.000.000	
	Pekerjaan Konstruksi K11	Paket	5.000.000.000	
2	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi			
	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi K1	Paket	1.500.000	
	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi K2	Paket	2.800.000	
	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi K3	Paket	3.900.000	
	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi K4	Paket	4.800.000	
	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi K5	Paket	5.500.000	
	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi K6	Paket	6.000.000	

	Pengawasan Konstruksi K7	Pekerjaan	Paket	7.200.000	
	Pengawasan Konstruksi K8	Pekerjaan	Paket	8.000.000	
	Pengawasan Konstruksi K9	Pekerjaan	Paket	8.400.000	
	Pengawasan Konstruksi K10	Pekerjaan	Paket	9.600.000	
	Pengawasan Konstruksi K11	Pekerjaan	Paket	10.000.000	
3	Pekerjaan Konstruksi				
	Pekerjaan Konstruksi A1		Paket	20.000.000	
	Pekerjaan Konstruksi A2		Paket	35.000.000	
	Pekerjaan Konstruksi A3		Paket	150.000.000	
	Pekerjaan Konstruksi A4		Paket	260.000.000	
4	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi				
	Pengawasan Konstruksi A1	Pekerjaan	Paket	15.000.000	
	Pengawasan Konstruksi A2	Pekerjaan	Paket	26.000.000	
	Pengawasan Konstruksi A3	Pekerjaan	Paket	100.000.000	
	Pengawasan Konstruksi A4	Pekerjaan	Paket	180.000.000	
5	Biaya Konsultasi dan RIPARKAB Nagan Raya		Paket	400.000.000	

K. Biaya Internet/Biaya Pengiriman/Biaya Kebersihan/Biaya Lainnya

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Indihome, 10 mbps	Unit/Bulan	450.000
2	Indihome, 20 mbps	Unit/Bulan	600.000
3	Indihome, 50 mbps	Unit/Bulan	900.000
4	Indihome, 100 mbps	Unit/Bulan	1.300.000
5	Biaya Pengiriman Surat menyurat		
	Jasa Pengiriman	Per tahun	500.000
	Jasa Pengiriman	Per tahun	1.000.000
	Jasa Pengiriman	Per tahun	1.500.000
	Jasa Pengiriman	Per tahun	2.000.000
	Jasa Pengiriman	Per tahun	3.000.000
	Jasa Pengiriman	Per tahun	4.000.000
	Jasa Pengiriman	Per tahun	6.000.000
	Jasa Pengiriman	Per tahun	8.000.000
	Jasa Pengiriman	Per tahun	10.000.000
	Jasa Pengiriman	Per tahun	15.000.000
	Jasa Pengiriman	Per tahun	20.000.000
6	Iuran Kebersihan	bulan	100.000
7	Belanja Souvenir, Cinderamata/plakat	Paket	2.000.000

8	Radio Internet		
	Radio internet, 3 Mbps	Per Bulan	750.000
	Radio internet, 5 Mbps	Per Bulan	1.000.000
	Radio internet, 10 Mbps	Per Bulan	1.100.000
	Radio internet, 20 Mbps	Per Bulan	1.700.000

L. Biaya Listrik

No	Golongan Tarif Listrik	Batas Daya	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Biaya Tarif Pemasangan Listrik				
	R-1/TR	0 – 450 VA	KWh	Rp 169	
	R-1/TR	451 – 900 VA	KWh	Rp 274	
	R-1M/TR	451 – 900 VA	KWh	Rp 1.352	
	R-1/TR	901 – 1.300 VA	KWh	Rp 1.444,70	
	R-1/TR	1.301 – 2.200 VA	KWh	Rp 1.444,70	
	R-2/TR	2.201 VA – 5.500 VA	KWh	Rp 1.444,70	
	R-3/TR	> 5.501 VA	KWh	Rp 1.444,70	
	B-1/TR	0 – 450 VA	KWh	Rp 254	
	B-1/TR	451 – 900 VA	KWh	Rp 420	
	B-1/TR	901 – 1.300 VA	KWh	Rp 966	
	B-1/TR	1.301 – 5.500 VA	KWh	Rp 1.100	
	B-2/TR	5.501 VA – 200 kVA	KWh	Rp 1.444,70	
	B-3/TM	> 200 kVA	KWh	Rp 1.035,78	
	I-1/TR	0 – 450 VA	KWh	Rp 160	
	I-1/TR	450 – 900 VA	KWh	Rp 315	
	I-1/TR	900 – 1.300 VA	KWh	Rp 930	
	I-1/TR	1.301 – 2.200 VA	KWh	Rp 960	
	I-1/TR	3.500 – 14.000 VA	KWh	Rp 1.112	
	I-2/TR	14.001 – 200 kVA	KWh	Rp 972	
	I-3P/TM	> 200 kVA	KWh	Rp 1.035,78	
	I-3/TM	> 200 kVA	KWh	Rp 1.035,78	
	I-4/TT	> 2.000 kVA	KWh	Rp 996,74	
	P-1/TR	0 – 450 VA	KWh	Rp 575	
	P-1/TR	451 – 900 VA	KWh	Rp 600	
	P-1/TR	1.300 VA	KWh	Rp 1.049	
	P-1/TR	2.200 – 5.500 VA	KWh	Rp 1.076	
	P-1/TR	5.501 – 200 kVA	KWh	Rp 1.444,70	
	P-2/TR	> 200 kVA	KWh	Rp 1.035,78	
2	Biaya Penambahan Daya Listrik				
	Penambahan Daya dari 450 VA ke 900 VA			421.650	

Penambahan Daya dari 450 VA ke 1.300 VA	796.450	
Penambahan Daya dari 450 VA ke 2.200 VA	1.639.750	
Penambahan Daya dari 450 VA ke 3.500VA	2.955.450	
Penambahan Daya dari 450 VA ke 4.400 VA	3.827.550	
Penambahan Daya dari 450 VA ke 5.500 VA	4.893.450	
Penambahan Daya dari 450 VA ke 7.700 VA	7.025.250	
Penambahan Daya dari 450 VA ke 11.000 VA	10.222.950	
Penambahan Daya dari 900 VA ke 1.300 VA	374.800	
Penambahan Daya dari 900 VA ke 2.200 VA	1.218.100	
Penambahan Daya dari 900 VA ke 3.500 VA	2.519.400	
Penambahan Daya dari 900 VA ke 4.400VA	3.391.500	
Penambahan Daya dari 900 VA ke 5.500 VA	4.457.400	
Penambahan Daya dari 900 VA ke 7.700 VA	6.589.200	
Penambahan Daya dari 900 VA ke 11.000 VA	9.786.900	
Penambahan Daya dari 1.300 VA ke 2.200 VA	843.300	
Penambahan Daya dari 1.300 VA ke 3.500 VA	2.131.800	
Penambahan Daya dari 1.300 VA ke 4.400VA	3.003.900	
Penambahan Daya dari 1.300 VA ke 5.500 VA	4.069.800	
Penambahan Daya dari 1.300 VA ke 7.700 VA	6.201.600	
Penambahan Daya dari 1.300 VA ke 11.000 VA	9.399.300	
Penambahan Daya dari 2.200 VA ke 3.500 VA	1.259.700	
Penambahan Daya dari 2.200 VA ke 4.400 VA	2.131.800	
Penambahan Daya dari 2.200 VA ke 5.500 VA	3.197.700	
Penambahan Daya dari 2.200 VA ke 7.700 VA	5.329.500	
Penambahan Daya dari 2.200 VA ke 11.000 VA	8.527.200	
Penambahan Daya dari 3.500 VA ke 4.400 VA	872.100	
Penambahan Daya dari 3.500 VA ke 5.500 VA	1.938.000	
Penambahan Daya dari 3.500 VA ke 7.700 VA	4.069.800	
Penambahan Daya dari 3.500 VA ke 11.000 VA	726.500	
Penambahan Daya dari 4.400 VA ke 5.500 VA	1.065.900	
Penambahan Daya dari 4.400 VA ke 7.700 VA	3.197.700	
Penambahan Daya dari 4.400 VA ke 11.000 VA	6.395.400	
Penambahan Daya dari 5.500 VA ke 7.700 VA	2.131.800	
Penambahan Daya dari 5.500 VA ke 11.000 VA	5.329.500	
Penambahan Daya dari 6.600 VA ke 10.600 VA	3.876.000	
Penambahan Daya dari 6.600 VA ke 13.200 VA	6.395.400	
Penambahan Daya dari 6.600 VA ke 16.500 VA	9.593.100	
Penambahan Daya dari 7.700 VA ke 11.000 VA	3.197.700	
Penambahan Daya dari 10.600 VA ke 13.200 VA	2.519.400	
Penambahan Daya dari 10.600 VA ke 16.500 VA	5.717.100	
Penambahan Daya dari 13.200 VA ke 16.500 VA	3.197.700	

Keterangan :

Golongan tarif listrik	Batas Daya	Konsumen
R-1/TR	1.300 VA	Rumah tangga kecil
R-1/TR	2.200 VA	Rumah tangga kecil
R-2/TR	3.500 VA – 5.500 VA	Rumah tangga menengah
R-3/TR	> 6.600 VA	Rumah tangga besar
B-2/TR	5.501 VA – 200 kVA	Bisnis sedang
B-3/TM	> 200 kVA	Bisnis besar
I-3/TM	> 200 kVA	Industri skala menengah
I-4/TT	> 30.000 kVA	Industri besar
P-1/TR	5.501 VA – 200 kVA	Kantor pemerintah kecil
P-2/TM	> 200 kVA	Kantor pemerintah besar
P-3/TR		Penerangan jalan umum
L/TR, TM, TT		Layanan khusus

M. Jaringan Listrik

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Instalasi Listrik Kecil	Paket	5.000.000	
2	Instalasi Listrik Sedang	Paket	10.000.000	
3	Instalasi Listrik Besar	Paket	20.000.000	

N. Penetapan Honorarium Petugas Khusus SKPK

1) Honorarium Untuk Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Penyapu Jalan	Orang/bulan	700.000	
2	Pembersih Riol	Orang/bulan	750.000	
3	Petugas Kebersihan Gedung Kantor	Orang/bulan	750.000	
4	Petugas Kebersihan Gedung Laboratorium	Orang/bulan	750.000	
5	Petugas Kebersihan Gedung TPA	Orang/bulan	750.000	
6	Koordinator Penyapu Jalan	Orang/bulan	900.000	
7	Petugas Pemotong Rumput	Orang/bulan	900.000	
8	Pemangkas Taman	Orang/bulan	800.000	
9	Koordinator Taman	Orang/bulan	900.000	
10	Perawatan Taman	Orang/bulan	750.000	
11	Perawatan Hutan Kota	Orang/bulan	750.000	
12	Petugas TPA	Orang/bulan	750.000	

13	Petugas Workshop	Orang/bulan	1.600.000	
14	Pembantu Petugas Workshop	Orang/bulan	1.500.000	
15	Operator Alat Berat	Orang/bulan	1.000.000	
16	Pembantu Operator Alat Berat	Orang/bulan	900.000	
17	Sopir Mobil Armada	Orang/bulan	1.000.000	
18	Sopir Mobil Amrul	Orang/bulan	1.000.000	
19	Sopir Mobil Tinja	Orang/bulan	1.000.000	
20	Sopir Mobil Tangki	Orang/bulan	1.000.000	
21	Becak Sampah	Orang/bulan	900.000	
22	Kernet Sopir Mobil Armada	Orang/bulan	900.000	
23	Kernet Sopir Mobil Amrul	Orang/bulan	900.000	
24	Kernet Sopir Mobil Tinja	Orang/bulan	900.000	
25	Kernet Sopir Mobil Tangki	Orang/bulan	900.000	
26	Kernet Becak Sampah	Orang/bulan	750.000	
27	Operator Komputer Timbangan TPA	Orang/bulan	900.000	
28	Operator Komputer Laboratorium TPA	Orang/bulan	900.000	
29	Koordinator TPA	Orang/bulan	900.000	
30	Satpam TPA	Orang/bulan	900.000	
31	Koordinator Pemotong Rumput	Orang/bulan	900.000	
32	Koordinator Pemangkas Taman	Orang/bulan	900.000	
33	Koordinator Armada Sampah	Orang/bulan	1.500.000	
34	Petugas Retribusi Sampah	Orang/bulan	900.000	
35	Pengelola Kebersihan Mussalla Alun - Alun	Orang/bulan	750.000	
36	Gaji Pengelola Kebersihan Tribun Utama Alun - Alun	Orang/bulan	750.000	
37	Gaji Pengelola Kebersihan Gedung Seminar Utama Alun - Alun	Orang/bulan	750.000	
38	Pengelola Air Bersih Alun - Alun	Orang/bulan	750.000	
39	Muazin Musalla Alun - Alun	Orang/bulan	750.000	
40	Imam Musalla Alun - Alun	Orang/bulan	1.000.000	
41	Biaya Uji Kualitas			
	Uji Air Sungai	Titik	2.780.000	
	Uji Air Hujan	Titik	2.000.000	
	Uji Air Danau	Titik	2.000.000	
	Uji Air Sumur	Titik	2.200.000	
	Uji Air Limbah Cair	Titik	520.000	
	Uji Udara Ambien	Titik	1.150.000	
	Uji Emisi Genset	Titik	2.030.000	
	Uji Getaran	Titik	250.000	
	Uji Kebisingan	Titik	75.000	

2) Honorarium Petugas Teknis Lapangan (Dinas PUPR)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Petugas Khusus Teknis	Orang/bulan	1.250.000	
2	Petugas Lapangan	Orang/bulan	700.000	
3	Petugas Jaga Gudang (Workshop)	Orang/Hari	25.000	
4	Operator Alat Berat	Orang/bulan	1.250.000	
5	Pembantu Operator Alat Berat	Orang/bulan	1.000.000	
6	Sopir	Orang/bulan	1.000.000	
7	Pengelola Stone Crusher	Orang/bulan	750.000	
8	Penjaga Pintu Bendung (PPB)	Orang/bulan	500.000	
9	Penjaga Pintu Air (PPA)	Orang/bulan	350.000	
10	Biaya Tenaga Ahli Kegiatan Penyusunan Lanjutan Revisi RTRW 2015-2035	Paket	172.000.000	
11	Bimbingan Teknis Teknisi Laboratorium Konstruksi Bidang PU Dinas PUPR Kab. Nagan	Paket	100.000.000	
12	Biaya Percepatan Penyusunan RRTR Simpang Peut dan Alue Bilie	Paket	400.000.000	
13	Biaya Lanjutan Penyusunan RRTR Ibu Kota Kecamatan Seunagan	Paket	400.000.000	
14	Kalibrasi Peralatan Laboratorium - Compression Machine - Proving Ring - Timbangan - Oven - Manometer Sondir - Jangka Sorong - Dial - Hammer Test	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	7.500.000 1.500.000 1.500.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000	
15	Service Peralatan Laboratorium - Elektric Sieve Shaker - Elektric Centrifuge Extractor - MEMMERT Universal Oven - Hydrometer Jar Bath - Mixer Chuseng/Viscometer - Electric CBR Test - Marshall Test - Water Bath - Water Heater - Benkelman beam test - Mesin Core Drill - Tamping Rammer	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000	
16	Koordinator Laboratorium	Orang/bulan	700.000	
17	Koordinator Workshop	Orang/bulan	700.000	
18	Tim Pendukung PPK PUPR	Orang/kali	500.000	
19	Tim Teknis PUPR			

	- Ketua	Orang/kali	1.000.000	
	- Sekretaris	Orang/kali	850.000	
	- Anggota	Orang/kali	800.000	

3) Satpol PP/WH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Petugas Tindak Internal (PTI)	Orang/bulan	300.000	
2	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Orang/bulan	1.000.000	
3	Biaya SBK Operasional di wilayah Non Terpencil			
	- Eselon II	Orang/Hari	300.000	
	- Eselon III	Orang/Hari	250.000	
	- Eselon IV	Orang/Hari	200.000	
	- Pelaksana Gol III/IV	Orang/Hari	175.000	
	- Pelaksana Gol I/II	Orang/Hari	150.000	
	- THL	Orang/Hari	125.000	
4	Biaya SBK Operasional di wilayah Terpencil			
	- Eselon II	Orang/Hari	400.000	
	- Eselon III	Orang/Hari	350.000	
	- Eselon IV	Orang/Hari	300.000	
	- Pelaksana Gol III/IV	Orang/Hari	250.000	
	- Pelaksana Gol I/II	Orang/Hari	225.000	
	- THL	Orang/Hari	175.000	
5	Honorarium Algojo Cambuk	Org/Kegiatan	500.000	
6	Petugas Pengamanan Pol PP dan WH	Org/Kegiatan	200.000	
7	Petugas Pengamanan POLRI	Org/Kegiatan	200.000	
8	Petugas Pengamanan TNI	Org/Kegiatan	200.000	
9	Petugas Kesehatan Cambuk	Org/Kegiatan	250.000	
10	Hakim Pengawas	Kasus/tahun	2.500.000	
11	Biaya Transportasi Petugas Lapas	Kasus/tahun	2.000.000	
12	Honorarium Tenaga Tim Penyidik POLRI/KORWAS	Kasus/tahun	1.000.000	
13	Pengacara Pendamping	Kasus/tahun	500.000	
14	Biaya Penjagaan Tahanan	Kasus/tahun	150.000	
15	Biaya Tuntutan Kasus Oleh Tim Kejaksaan	Kasus/Keg	10.000.000	
16	Biaya Tim Medis saat Penyidikan/Tahanan	Kasus/Keg	2.000.000	
17	Biaya Pemanggilan Saksi	Kasus/Keg	1.000.000	
18	Biaya Penjemputan Terduga Pelanggaran Syari'at Islam	Org/Kasus	200.000	
19	Biaya Tim Ahli Pemeriksaan Barang Bukti	Org/Kasus	6.000.000	
20	Petugas Piket Kantor Bupati, Pendopo Bupati/Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda dan Mako Satpol PP dan WH	Orang/Hari	10.000	

4) Dinas Perhubungan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
----	--------	--------	---------------	-----

1	Petugas Jaga PKB	Orang/bulan	750.000	
2	Petugas Jaga Mobar	Orang/bulan	750.000	
3	Cleaning Service PKB	Orang/bulan	700.000	
4	Cleaning Service Mobar	Orang/bulan	700.000	
5	Sopir Mobil Patwal	Orang/bulan	700.000	
6	Sopir Bus Sekolah	Orang/bulan	1.100.000	
7	Petugas Penertiban perizinan: - Golongan IV - Golongan III - Golongan II - PPNS	Orang/Shift Orang/Shift Orang/Shift Orang/Shift	400.000 300.000 250.000 250.000	
8	Petugas penertiban H-7 dan H+7 Idul Fitri	Orang/Hari	250.000	
9	Petugas penertiban lalu lintas pasar	Orang/Hari	250.000	
10	Petugas Pengamanan Lalu Lintas Pagi	Orang/Hari	30.000	
11	Petugas Pengamanan Lalu Lintas Bulan Ramadhan	Orang/Hari	250.000	
12	Petugas penertiban lalu lintas, PATWAL dan kegiatan lainnya Gol IV	Orang/Hari	400.000	
13	Petugas penertiban lalu lintas, PATWAL dan kegiatan lainnya Gol III	Orang/Hari	300.000	
14	Petugas penertiban lalu lintas, PATWAL dan kegiatan lainnya Gol II	Orang/Hari	250.000	
15	Petugas penertiban lalu lintas, PATWAL dan kegiatan lainnya THL/P3K	Orang/Hari	150.00	
16	Petugas Pengamanan dan Penertiban Mobil Barang	Orang/Hari	250.000	
17	Petugas Pengamanan dan Penertiban Mobil Barang THL/P3K	Orang/Hari	150.000	
18	Petugas Pengamanan dan Penertiban Mobil Barang TNI/POLRI	Orang/Hari	250.000	
19	Petugas Penertiban perizinan (THL/P3K)	Orang/Sessi	150.000	
20	Petugas Penertiban perizinan (TNI/POLRI)	Orang/Sessi	250.000	
21	Petugas penertiban H-7 dan H+7 Idul Fitri Tenaga Harian Lepas (THL)/P3K	Orang/Hari	150.000	
22	Petugas penertiban lalu lintas pasar Tenaga Harian Lepas (THL)/P3K	Orang/Hari	150.000	
23	Petugas penertiban lalu lintas simpang pagi (THL)/P3K	Orang/Hari	25.000	
24	Petugas penertiban lalu lintas simpang siang (THL)/P3K	Orang/Hari	25.000	
25	Petugas Pengamanan Lalu Lintas Bulan Ramadhan Tenaga Harian Lepas (THL)/P3K	Orang/Hari	150.000	

5) Dinas Perkebunan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Petugas Koordinasi Mantri Kebun (Manbun) PNS	Orang/bulan	700.000	
2	Petugas Mantri Kebun (Manbun) PNS	Orang/bulan	600.000	
3	Petugas Mantri Kebun (Manbun) THL	Orang/bulan	1.000.000	
4	Petugas Pengamat Hama Tanaman Perkebunan Kabupaten (POPT)	Orang/bulan	600.000	
5	Petugas Personalia Brigade Kebakaran Lahan	Orang/kali	300.000	
6	Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)			
	Ketua KTPA	Orang/kali	350.000	
	Sekretaris KTPA	Orang/kali	250.000	
	Bendahara KTPA	Orang/kali	250.000	
	Anggota KTPA	Orang/kali	150.000	
7	Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B)	lembar	250.000	
8	Petugas Pencacah Data Perkebunan Rakyat Tingkat Desa	Orang/Desa	500.000	
9	Petugas Pendamping Pencacah Data Perkebunan Rakyat dari Desa	Orang/Desa	250.000	
10	Petugas Teknis Lapangan	Org/Bulan	700.000	
11	Petugas Lapangan (ASN)	Org/Bulan	500.000	
12	Petugas Lapangan (THL)	Org/Bulan	350.000	
13	Petugas Pendamping Lapangan (ASN)	Org/Bulan	500.000	
14	Petugas Pendamping Lapangan (THL)	Org/Bulan	350.000	
15	Petugas Pencacah Data Luas Perkebunan Rakyat	Org/Bulan	250.000	
16	Petugas Pelaporan Kegiatan (ASN)	Org/Keg	500.000	
17	Petugas Pelaporan Kegiatan (THL)	Org/Keg	400.000	
18	Petugas Calon Petani Calon Lahan (CPCL) (ASN)	Org/Keg	700.000	
19	Petugas Calon Petani Calon Lahan (CPCL) (THL)	Org/Keg	500.000	
20	Sewa Lahan Praktek	Hektar/Bulan	4.000.000	

6) Dinas Pertanian dan Peternakan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Petugas Simluhtan Kabupaten	Orang/bulan	200.000	
2	Petugas Simluhtan Kecamatan	Orang/bulan	200.000	
3	Petugas Penanggung Jawab Simluhtan	Orang/bulan	300.000	

4	Petugas Khusus Bidang Pertanian dan Peternakan	Orang/bulan	770.000	
5	Petugas Pendamping Demplot	Orang/bulan	350.000	
6	Supervisi Koordinator BPP	Orang/Kali	250.000	
7	Petugas Vaksinasi SE	Orang/Ekor	2.000	
8	Petugas Vaksinasi ND	Orang/Ekor	1.000	
9	Petugas Medis/Paramedis Penyakit Ternak	Orang/Ekor	5.000	
10	Petugas Pendamping Kelompok Ternak	Kelompok	20.000	
11	Petugas Kler Master	Orang/Hari	20.000	
12	Petugas pengambilan spesimen pada ternak	Sampel	3.000	
13	Petugas Jasa IB	Ekor	3.000	
14	Petugas Ahli Peternakan	Orang/bulan	1.000.000	
15	Tenaga Ahli Pakan Ternak	Orang/bulan	1.000.000	
16	Petugas Paramedis (penyakit reproduksi)	Orang/bulan	200.000	
17	Petugas Pengawas Kebun HMT	Orang/bulan	200.000	
18	Petugas Pengawas Performa Ternak dan Recording	Orang/bulan	200.000	
19	Petugas Penyusun dan Pengawasan Komposisi gizi pakan ternak	Orang/bulan	200.000	
20	Keujruen Nagan	Orang/bulan	1.200.000	
21	Keujruen Chiek	Orang/bulan	750.000	
22	Hop Keujruen	Orang/bulan	400.000	
22	Keujruen Blang	Orang/bulan	200.000	
23	Biaya Jasa Pembersihan Jaringan Irigasi/Tersier dan Drainase	Meter	25.000	
24	Jasa Konsultasi Penyusunan Penetapan Qanun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Paket	50.000.000	
25	Jasa Konsultasi Penyusunan Penetapan Qanun Pengelolaan UPTD Peternakan Padang Turi	Paket	50.000.000	
26	Jasa Konsultasi Penyusunan Data Base Food Estate (Lumbung Pangan)	Paket	50.000.000	
27	Tenaga Harian Lepas (THL) Dokter Hewan	Org/Bulan	2.500.000	

7) Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Petugas BBI	Orang/bulan	700.000	
2	Petugas Khusus Ahli Perikanan	Orang/bulan	4.250.000	
3	Petugas PPI dan TPI	Orang/bulan	700.000	
4	Panglima Laot Kabupaten	Orang/bulan	1.500.000	

5	Wakil Panglima Laot Kabupaten	Orang/bulan	1.000.000	
6	Sekretaris Panglima Laot Kabupaten	Orang/bulan	1.000.000	
7	Bendahara Panglima Laot Kabupaten	Orang/bulan	1.000.000	
8	Panglima Laot Lhok	Orang/bulan	1.000.000	
9	Koordinator Petugas Teknis Lapangan	Orang/bulan	1.300.000	
10	Petugas Teknis Lapangan	Orang/bulan	750.000	

8) Dinas Sosial

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Petugas kebersihan Makam Pahlawan Blang Sapek	Orang/bulan	300.000	
2	Petugas kebersihan Makam Tsunami Pucok Lung	Orang/bulan	200.000	
3	Petugas kebersihan Makam Tsunami Cot Mee	Orang/bulan	200.000	
4	Petugas kebersihan Makam Tsunami Ujong Patihah (Ds. Keumangan I)	Orang/bulan	200.000	
5	Petugas kebersihan Makam Tsunami Ujong Patihah (Ds. Keumangan II)	Orang/bulan	200.000	
6	Petugas kebersihan Makam Tsunami Ujong Patihah (Ds. Rahmad)	Orang/bulan	200.000	
7	Petugas kebersihan Makam Tsunami Kuala Trang	Orang/bulan	200.000	
8	Guru Ngaji Panti Asuhan	Orang/bulan	700.000	
9	Tukang Masak Panti Asuhan	Orang/bulan	1.000.000	
10	Pengasuh Anak Panti Asuhan	Orang/bulan	1.000.000	
11	Perawat Kesehatan Panti Asuhan	Orang/bulan	850.000	
12	Jasa Kunjungan Dokter Panti Asuhan	Org/Kl/Bln	250.000	
13	Pelatih Tarian Gelombang Panti Asuhan	Orang/bulan	500.000	
14	Pengasuh Anak-anak terlantar	Orang/bulan	700.000	
15	Relawan Penanggulangan Bencana	Org/Kali	1.000.000	

9) Dinas Syariat Islam

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Petugas Penjaga Museum Alquran	Orang/bulan	700.000	
2	Ketua LPPTQ	Orang/bulan	600.000	
3	Wakil Ketua LPPTQ	Orang/bulan	550.000	
4	Sekretaris LPPTQ	Orang/bulan	500.000	
5	Anggota LPPTQ	Orang/bulan	400.000	
6	Uang Saku Siswa MUQ	Orang/bulan	192.000	

7	Kepala Sekolah MUQ	Orang/bulan	1.900.000	
8	Pimpinan Dayah MUQ	Orang/bulan	2.700.000	
9	Kurikulum Dayah MUQ	Orang/bulan	2.500.000	
10	Ketua Asrama Putra MUQ	Orang/bulan	2.500.000	
11	Ketua Asrama Putri MUQ	Orang/bulan	2.500.000	
12	Koordinator Hafidz Putra	Orang/bulan	2.400.000	
13	Koordinator Hafidz Putri	Orang/bulan	2.400.000	
14	Pendamping Santri Putra	Orang/bulan	2.400.000	
15	Pendamping Santri Putri	Orang/bulan	2.400.000	
16	Guru Santri MUQ	Orang/bulan	1.500.000	
17	Administrasi MUQ	Orang/bulan	1.500.000	
18	Tukang Masak MUQ	Orang/bulan	1.500.000	
19	Security MUQ	Orang/bulan	1.500.000	
20	Cleaning Service MUQ	Orang/bulan	1.200.000	
21	Petugas Listrik	Orang/bulan	1.200.000	
22	Petugas Air	Orang/bulan	1.200.000	
23	Uang Tambahan Mengajar	Orang/Jam	15.000	
24	Makan Minum Siswa MUQ	Orang/bulan	250.000	
25	Honorarium Dewan Hakim LPTQ	Orang/bulan	300.000	
26	Bantuan pendidikan Kafilah Bidang Khattil Qur'an di Suka Bumi	Org/Tahun	30.000.000	
27	Transportasi Group Zikir dari Kecamatan	Group	1.000.000	
28	Transportasi Anak Yatim dari Kecamatan	Orang	30.000	
29	Biaya Apresiasi Pemuncak I, II, III dan Harapan MTQ se Aceh			
	Juara I (Haji)	Orang	35.000.000	
	Juara II (Umrah)	Orang	28.000.000	
	Juara III	Orang	10.000.000	
	Juara Harapan I	Orang	7.000.000	
	Juara Harapan II	Orang	5.000.000	
	Juara Harapan III	Orang	3.000.000	
30	Belanja Kontribusi Kabupaten/Kota Peserta MTQ	Paket	75.000.000	
	Mesjid Agung Kabupaten			
32	Imam Chik	Org/Bulan	2.000.000	
33	Imam Rawatib	Org/Bulan	1.800.000	
34	Muazzin	Org/Bulan	1.600.000	
35	Qori	Org/Bulan	1.500.000	
36	Petugas Cleaning Service Mesjid Agung	Org/Bulan	1.300.000	
37	Petugas Tenaga Air Mesjid Agung	Org/Bulan	1.500.000	

38	Petugas Adm/Pengatur Mesjid Agung	Org/Bulan	1.500.000	
39	Petugas Keamanan Mesjid Agung	Org/Bulan	1.500.000	

10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Honor KIE PPKBD Posyandu Wil Non DTPK	Org/Desa/Bln	200.000	
2	Honor KIE Sub PPKBD Posyandu Wil Non DTPK	Org/Desa/Bln	200.000	
3	Honor Fasilitator BOK KB	Orang/kali	200.000	
4	Uang Transportasi peserta BOK KB	Orang/kali	100.000	
5	Uang Transportasi Fasilitator	Orang/kali	150.000	
6	Honor THL PL KB Kecamatan	Orang/ bulan	700.000	
7	Sopir Dinas DPMPG4	Orang/ bulan	1.000.000	
9	Hadiah Lomba Kegiatan			
	Juara I	Org/Kali	1.800.000	
	Juara II	Org/Kali	1.300.000	
	Juara III	Org/Kali	1.000.000	
	Juara Harapan I	Org/Kali	500.000	
	Juara Harapan II	Org/Kali	250.00	
	Juara Harapan III	Org/Kali	250.000	
11	Bahan Perlengkapan Kegiatan PKK			
	Bahan Baku Lomba Masak PKK Tingkat Provinsi	Paket	2.000.000	
	Bahan Dan Peralatan Pemeriksaan Iva Test Keg. PKK	Paket	3.500.000	
12	Petugas Kebersihan Kantor PKK	Org/Bulan	700.000	
15	Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin			
	Jasa Tenaga Medis	Org/Hari	250.000	
17	Penjaga Balai Penyuluhan KB	Org/Bulan	500.000	
18	Biaya Bahan Pembuatan Pusat Kreatifitas Anak (PKA)	Paket	20.000.000	
20	Belanja Perjalanan Dinas PKK Kab. Nagan Raya			
	A. Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	1. Uang Saku Ketua PKK	Org/hari	125.000	
	2. Uang Makan Ketua PKK	Org/hari	150.000	
	3. Uang Makan Pokja	Org/hari	40.000	
	4. Uang Saku Pokja	Org/hari	80.000	
	5. Uang Saku Anggota Pokja	Org/hari	70.000	
	6. Uang Makan Anggota Pokja	Org/hari	40.000	

	7. Transport Lokal Pokja	Org/hari	50.000	
	8. Transport Lokal Anggota Pokja	Org/hari	50.000	
B. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Prov. Aceh				
	1. Uang Saku Ketua PKK	Org/hari	250.000	
	2. Uang Makan Ketua PKK	Org/hari	250.000	
	3. Uang Makan Pokja	Org/hari	140.000	
	4. Uang Saku Pokja	Org/hari	125.000	
	5. Uang Saku Anggota Pokja	Org/hari	100.000	
	6. Uang Makan Anggota Pokja	Org/hari	120.000	
	7. Transport Lokal Pokja	Org/hari	125.000	
	8. Transport Lokal Anggota Pokja	Org/hari	125.000	
	9. Penginapan Ketua PKK	Org/Malam	500.000	
	10. Penginapan Pokja	Org/Malam	250.000	
	11. Penginapan Anggota Pokja	Org/Malam	250.000	
C. Perjalanan Dinas Luar Daerah Prov. Aceh				
	1. Uang Saku Ketua PKK	Org/hari	350.000	
	2. Uang Makan Ketua PKK	Org/hari	300.000	
	3. Uang Makan Pokja	Org/hari	175.000	
	4. Uang Saku Pokja	Org/hari	125.000	
	5. Uang Saku Anggota Pokja	Org/hari	225.000	
	6. Transport Lokal Ketua PKK	Org/hari	250.000	
	7. Transport Lokal Pokja	Org/hari	200.000	
	8. Penginapan Ketua PKK	Org/Malam	1.000.000	
	9. Penginapan Pokja	Org/Malam	700.000	
21	Tim Penilai Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa	Group	4.000.000	
22	Lomba TTG Kabupaten			
	Hadiah Pertama	Group	4.000.000	
	Hadiah Kedua	Group	3.000.000	
	Hadiah Ketiga	Group	2.000.000	

11) Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan (Inspektorat)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan				
1	Penanggung Jawab	Orang/hari	550.000	
2	Wakil Penanggung Jawab	Orang/hari	500.000	
3	Pengendali Teknis	Orang/hari	450.000	
4	Ketua Tim	Orang/hari	425.000	
5	Anggota :			
	- JFA Pertama	Orang/hari	400.000	
	- JFA Terampil	Orang/hari	350.000	

	- JFU (Gol. III/IV)	Orang/hari	300.000	
	- JFU (Gol. I/II)	Orang/hari	250.000	
6	A. Besaran Tarif Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Auditor			
	1. Pelatihan JFA dengan Metode Pelatihan Blended Learning, Perpaduan E-Learning dan Tatap Muka			
	Terampil	Org/kali	9.210.000	
	Ahli Pertama	Org/kali	10.667.000	
	Ahli Muda	Org/kali	9.210.000	
	Ahli Madya	Org/kali	8.034.000	
	Ahli Utama	Org/kali	8.670.000	
	2. Pelatihan JFA dengan Metode Pelatihan Blended Learning, Perpaduan E-Learning dan Tatap Muka			
	Terampil	Org/kali	4.860.000	
	Ahli Pertama	Org/kali	5.738.000	
	Ahli Muda	Org/kali	4.860.000	
	Ahli Madya	Org/kali	4.152.000	
	Ahli Utama	Org/kali	4.536.000	
	B. Besaran Tarif Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Substantif			
	1. Pelatihan Tehnis Substantif dengan Metode pembelajaran Tatap Muka			
	Sampai 4 hari	Org/kali	1.475.000	
	Diatas 4 hari	Org/kali	1.530.000	
	2. Pelatihan Tehnis Substantif dengan Metode pembelajaran Jarak Jauh			
	Sampai 4 hari	Org/kali	2.040.000	
	Diatas 4 hari	Org/kali	2.340.000	

12) Dinas Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Pengelola TB, Paru, dan Kusta	Orang/ Bln	500.000	
2	Petugas Piket Malam	Orang/ Hari	30.000	
3	Petugas Piket Hari-hari Besar	Orang/ Hari	300.000	
4	Petugas Hari Libur	Orang/ Hari	25.000	
5	Petugas Piket Malam Poned	Orang/Malam	20.000	
6	Petugas Piket Malam Poned/UGD	Orang/Malam	40.000	
7	Verifikasi Keuangan UPTD	Orang/Bln	750.000	
8	Admin BOK	Orang/Bln	500.000	
9	Admin JKN	Orang/Bln	500.000	
10	Pengelola Obat Puskesmas	Orang/Bln	500.000	
11	Pengelola Aplikasi ASPAK	Orang/Bln	500.000	
12	Insentif Dokter Umum	Orang/Bln	1.000.000	
13	Insentif Dokter Gigi	Orang/Bln	1.000.000	
14	Insentif Apoteker	Orang/Bln	1.000.000	

15	Insentif Ners	Orang/Bln	1.000.000	
16	Tenaga Harian Lepas (THL)			
	S-1 Kedokteran	Orang/Bln	3.000.000	
	S-1 Kedokteran Gigi	Orang/Bln	3.000.000	
	S-1 Keperawatan+Ners	Orang/Bln	2.000.000	
17	Biaya Jasa Konsultansi Registrasi Puskesmas dan UPTD	Paket	106.000.000	
18	Foging			
	Koordinator Pelaksana Fogging	Desa	170.000	
	Pengelola Pelaksana Fogging	Desa	150.000	
	Petugas Fogging	Desa	200.000	
19	Biaya pembayaran Limbah Medis B3	Kg	55.000	
20	Belanja Medical Check Up	Org/Kali	800.000	
21	Transportasi Tim Medis antar jemput jamaah Haji ke Asrama Haji Banda Aceh	Paket	10.000.000	
22	Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Nagan Raya			
	Kepala Markas	Org/Bulan	700.000	
	Staf pelayanan kesehatan dan sosial	Org/Bulan	700.000	
	Staf penanggulangan bencana	Org/Bulan	700.000	
	Staf ADM	Org/Bulan	700.000	
	Staf Relawan dan OD	Org/Bulan	700.000	
	Sopir	Org/Bulan	700.000	
	Petugas Kebersihan	Org/Bulan	700.000	
	Koordinator Donor Darah	Org/Bulan	700.000	
	Ketua	Org/Bulan	650.000	
	Sekretaris	Org/Bulan	600.000	
	Wakil Sekretaris	Org/Bulan	450.000	
	Bendahara	Org/Bulan	500.000	
	Wakil Ketua Bidang	Org/Bulan	550.000	
	Anggota PMI	Org/Bulan	450.000	
	Kru Ambulan PMI	Org/Bulan	700.000	
25	Operasional Pengamanan Insidentil Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	Bulan/Unit	25.000.000	
26	Operasional Advokasi Pendampingan Hukum Insidentil Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	Kali	50.000.000	
27	Program Kesehatan Haji			
	- Insentif Pengelola Program Kesehatan Haji	Org/Bulan	1.000.000	
	- Insentif Pengelola Siskohatkes	Org/Bulan	500.000	

	- Insentif Dokter Umum Kesehatan Haji	Org/Bulan	1.000.000	
	- Insentif Pengelola Program Kesehatan Haji Puskesmas	Org/Bulan	500.000	
28	Program Operasional PSC 119			
	- Dokter PSC (Non PNS)	Org/Bulan	3.000.000	
	- Penanggung Jawab PSC	Org/Bulan	1.500.000	
	- Koordinator PSC	Org/Bulan	1.300.000	
	- Wakil Koordinator PSC	Org/Bulan	1.000.000	
29	Biaya Pemusnahan Limbah Medis	Kg	55.000	
30	Fasilitator Kabupaten (FasKab) STBM	Org/Bulan	1.500.000	
31	Insentif Pemegang Program Puskesmas	Org/Bulan	500.000	
32	Insentif Pengelola Program PIS-PK	Org/Bulan	1.000.000	
33	Insentif Pengelola Program Saka Bakti Husada	Org/Bulan	1.000.000	
34	Insentif Pengelola Program Quik Win	Org/Bulan	500.000	
35	Petugas Khusus Tracer	Orang/kali	325.000	
36	Honorarium Penemuan Kasus Covid-19	Org/Kali	15.000	
37	Petugas Surveilans	Org/Kali	1.000.000	
38	Akreditasi Puskesmas			
	Honor TPMDK	Org/jam	450.000	
	Penginapan Peserta Puskesmas Sulit	Org/Hari	400.000	
	Honor Surveior Akreditasi Puskesmas	Org/jam	900.000	
	Paket Pelatihan Petugas Pengawas Pangan	Paket	5.000.000	
39	Belanja Jasa Pengamanan COVID-19			
	Pimpinan	Org/Bulan	1.700.000	
	Kapolsek	Org/Bulan	1.400.000	
	Danramil	Org/Bulan	1.400.000	
	Kanit Binmas Polsek	Org/Bulan	1.200.000	
	Kanit Intelkam Polsek	Org/Bulan	1.200.000	
	KAJARI	Org/Bulan	1.200.000	
	Batih Komsos Koramil	Org/Bulan	1.200.000	
	Batuud Koramil	Org/Bulan	1.200.000	
	Anggota Koramil dan Polsek	Org/Bulan	1.000.000	

13) Puskesmas

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Puskesmas Beutong Ateuh			
	Kepala Puskesmas	Org/Bulan	650.000	

	Kepala Tata Usaha	Org/Bulan	410.000	
	Bendahara Jkn	Org/Bulan	520.000	
	Dokter Pns	Org/Bulan	600.000	
	Apoteker/Ners Pns	Org/Bulan	360.000	
	Apoteker/Ners Non Pns	Org/Bulan	300.000	
	D4/S1 Kesehatan Pns	Org/Bulan	320.000	
	D4/S1 Kesehatan Non Pns	Org/Bulan	280.000	
	D3 Kesehatan Pns	Org/Bulan	300.000	
	D3 Kesehatan Non Pns	Org/Bulan	260.000	
	Non Kesehatan Dibawah D3 Non Pns	Org/Bulan	140.000	
2	Puskesmas Beutong			
	Kepala Puskesmas	Org/Bulan	1.000.000	
	Kepala Tata Usaha	Org/Bulan	700.000	
	Bendahara JKN	Org/Bulan	800.00	
	Dokter PNS	Org/Bulan	950.000	
	Dokter Non PNS	Org/Bulan	775.000	
	Apoteker/Ners Non PNS	Org/Bulan	500.000	
	D4/S1 Kesehatan PNS	Org/Bulan	750.000	
	D4/S1 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	500.000	
	D3 Kesehatan PNS	Org/Bulan	650.000	
	D3 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	400.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	350.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan PNS	Org/Bulan	550.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 Non PNS	Org/Bulan	200.000	
3	Puskesmas Uteun Pulo			
	Kepala Puskesmas	Org/Bulan	1.150.000	
	Kepala Tata Usaha	Org/Bulan	850.000	
	Bendahara JKN	Org/Bulan	810.000	
	Dokter PNS	Org/Bulan	1.150.000	
	D4/S1 Kesehatan PNS	Org/Bulan	750.000	
	D4/S1 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	450.000	
	D3 Kesehatan PNS	Org/Bulan	640.000	
	D3 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	295.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan PNS	Org/Bulan	530.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten	Org/Bulan	254.000	

	Tenaga Kesehatan Non PNS			
	Non kesehatan Dibawah D3 PNS	Org/Bulan	430.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 Non PNS	Org/Bulan	150.000	
4	Puskesmas Jeuram			
	Kepala Puskesmas	Org/Bulan	1.250.00	
	Kepala Tata Usaha	Org/Bulan	850.000	
	Bendahara JKN	Org/Bulan	950.000	
	Dokter PNS	Org/Bulan	1.100.000	
	Dokter Non PNS	Org/Bulan	850.000	
	Apoteker/Ners Non PNS	Org/Bulan	520.000	
	D4/S1 Kesehatan PNS	Org/Bulan	720.000	
	D4/S1 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	400.000	
	D3 Kesehatan PNS	Org/Bulan	600.000	
	D3 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	320.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan PNS	Org/Bulan	600.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	320.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 PNS	Org/Bulan	400.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 Non PNS	Org/Bulan	200.000	
5	Puskesmas Cot Kuta			
	Kepala Puskesmas	Org/Bulan	1.200.000	
	Kepala Tata Usaha	Org/Bulan	800.000	
	Bendahara JKN	Org/Bulan	900.000	
	Dokter PNS	Org/Bulan	1.100.000	
	Dokter Non PNS	Org/Bulan	850.000	
	D4/S1 Kesehatan PNS	Org/Bulan	850.000	
	D4/S1 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	500.000	
	D3 Kesehatan PNS	Org/Bulan	750.000	
	D3 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	450.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan PNS	Org/Bulan	600.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	350.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 PNS	Org/Bulan	500.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 Non PNS	Org/Bulan	250.000	
6	Puskesmas Ujong Fatihah			

	Kepala Puskesmas	Org/Bulan	2.500.000	
	Kepala Tata Usaha	Org/Bulan	2.000.000	
	Bendahara JKN	Org/Bulan	1.800.000	
	Dokter PNS	Org/Bulan	1.600.000	
	Dokter Non PNS	Org/Bulan	1.400.000	
	Apoteker/Ners PNS	Org/Bulan	1.400.000	
	Apoteker/Ners Non PNS	Org/Bulan	900.000	
	D4/S1 Kesehatan PNS	Org/Bulan	1.200.000	
	D4/S1 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	800.000	
	D3 Kesehatan PNS	Org/Bulan	1.100.000	
	D3 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	750.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan PNS	Org/Bulan	700.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	650.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 PNS	Org/Bulan	700.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 Non PNS	Org/Bulan	500.000	
7	Puskesmas Padang Rubek			
	Kepala Puskesmas	Org/Bulan	650.000	
	Kepala Tata Usaha	Org/Bulan	450.000	
	Bendahara JKN	Org/Bulan	510.000	
	Dokter PNS	Org/Bulan	600.000	
	Dokter Non PNS	Org/Bulan	500.000	
	D4/S1 Kesehatan PNS	Org/Bulan	450.000	
	D4/S1 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	300.000	
	D3 Kesehatan PNS	Org/Bulan	450.000	
	D3 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	250.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan PNS	Org/Bulan	350.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	200.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 Non PNS	Org/Bulan	120.000	
8	Puskesmas Padang panjang			
	Kepala Puskesmas	Org/Bulan	1.158.000	
	Kepala Tata Usaha	Org/Bulan	724.000	
	Bendahara JKN	Org/Bulan	820.000	
	Dokter PNS	Org/Bulan	1.061.000	
	Apoteker/Ners PNS	Org/Bulan	820.000	

	D4/S1 Kesehatan PNS	Org/Bulan	724.000	
	D4/S1 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	459.000	
	D3 Kesehatan PNS	Org/Bulan	627.000	
	D3 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	385.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	314.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 PNS	Org/Bulan	459.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 Non PNS	Org/Bulan	193.000	
9	Puskesmas Kuala Tadu			
	Kepala Puskesmas	Org/Bulan	550.000	
	Kepala Tata Usaha	Org/Bulan	350.000	
	Bendahara JKN	Org/Bulan	500.000	
	Dokter PNS	Org/Bulan	500.000	
	Dokter Non PNS	Org/Bulan	470.000	
	D4/S1 Kesehatan PNS	Org/Bulan	350.000	
	D4/S1 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	260.000	
	D3 Kesehatan PNS	Org/Bulan	300.000	
	D3 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	250.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	260.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 PNS	Org/Bulan	260.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 Non PNS	Org/Bulan	100.000	
10	Puskesmas Lueng Keube Jagat			
	Kepala Puskesmas	Org/Bulan	1.800.000	
	Kepala Tata Usaha	Org/Bulan	1.400.000	
	Bendahara JKN	Org/Bulan	1.400.000	
	Dokter PNS	Org/Bulan	1.700.000	
	Dokter Non PNS	Org/Bulan	1.400.000	
	D4/S1 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	800.000	
	D3 Kesehatan PNS	Org/Bulan	1.100.000	
	D3 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	800.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 Non PNS	Org/Bulan	300.000	
11	Puskesmas Simpang Jaya			
	Kepala Puskesmas	Org/Bulan	1.400.000	
	Kepala Tata Usaha	Org/Bulan	1.000.000	
	Bendahara JKN	Org/Bulan	1.100.000	
	Dokter PNS	Org/Bulan	1.300.000	

	Dokter Non PNS	Org/Bulan	1.200.000	
	Apoteker/Ners PNS	Org/Bulan		
	Apoteker/Ners Non PNS	Org/Bulan	550.000	
	D4/S1 Kesehatan PNS	Org/Bulan	950.000	
	D4/S1 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	550.000	
	D3 Kesehatan PNS	Org/Bulan	750.000	
	D3 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	400.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan PNS	Org/Bulan	700.000	
	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	350.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 PNS	Org/Bulan	500.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 Non PNS	Org/Bulan	250.000	
12	Puskesmas Alue Bilie			
	Kepala Puskesmas	Org/Bulan	1.400.000	
	Kepala Tata Usaha	Org/Bulan	1.250.000	
	Bendahara JKN	Org/Bulan	1.200.000	
	Dokter PNS	Org/Bulan	1.500.000	
	Dokter Non PNS	Org/Bulan	1.200.000	
	Apoteker/Ners PNS	Org/Bulan	800.000	
	Apoteker/Ners Non PNS	Org/Bulan	700.000	
	D4/S1 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	700.000	
	D3 Kesehatan PNS	Org/Bulan	900.000	
	D3 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	560.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 PNS	Org/Bulan	650.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 Non PNS	Org/Bulan	350.000	
13	Puskesmas Suka Mulia			
	Kepala Puskesmas	Org/Bulan	1.600.000	
	Kepala Tata Usaha	Org/Bulan	1.050.000	
	Bendahara JKN	Org/Bulan	1.350.000	
	Dokter PNS	Org/Bulan	1.450.000	
	Dokter Non PNS	Org/Bulan	1.150.000	
	Apoteker/Ners Non PNS	Org/Bulan	800.000	
	D4/S1 Kesehatan PNS	Org/Bulan	1.050.000	
	D4/S1 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	800.000	
	D3 Kesehatan PNS	Org/Bulan	900.000	
	D3 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	500.000	

	Non Kesehatan(Paling Rendah D3 / Asisten Tenaga Kesehatan PNS	Org/Bulan	800.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 PNS	Org/Bulan	800.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 Non PNS	Org/Bulan	300.000	
14	Puskesmas Alue Rambot			
	Kepala Puskesmas	Org/Bulan	1.950.000	
	Kepala Tata Usaha	Org/Bulan	1.700.000	
	Bendahara JKN	Org/Bulan	1.850.000	
	Dokter PNS	Org/Bulan	1.750.000	
	Apoteker/Ners PNS	Org/Bulan	1.500.000	
	Apoteker/Ners Non PNS	Org/Bulan	1.100.000	
	D4/S1 Kesehatan PNS	Org/Bulan	1.350.000	
	D4/S1 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	950.000	
	D3 Kesehatan PNS	Org/Bulan	1.300.000	
	D3 Kesehatan Non PNS	Org/Bulan	900.000	
	Non kesehatan Dibawah D3 Non PNS	Org/Bulan	500.000	
	Non Kapitasi			
	Pelayanan Persalinan Normal	Org/Kali	700.000	
	Pelayanan Persalinan Emergency Dasar Uskesmas Poned	Org/Kali	950.000	
	Pelayanan Ambulan (Rujukan)	Rujukan/Kilometer (KM)	6.000	
	Pelayanan Rawat Inap	Org/Hari	200.000	
	Pelayanan Pra Rujukan	Orang	125.000	
	Pelayanan ANC	Org/Kunjungan	50.000	
	Pelayanan PNC	Org/Kunjungan	25.000	
	Tenaga Ahli			
	Petugas P care	Org/Bulan	300.000	
	Pemusnahan Limbah Medis			
	Pemusnahan Limbah Medis	Kilogram (KG)	65.000	

14) Dinas Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Pemeriksa Angka Kredit	Orang/Bln	500.000	
2	Cleaning Service Sekolah	Orang/Bln	700.000	
3	Hadiah Pembinaan Event Pendidikan			
	Hadiah Pembinaan Event Pendidikan Juara I	Orang	1.000.000	
	Hadiah Pembinaan Event Pendidikan Juara II	Orang	750.000	

	Hadiah Pembinaan Event Pendidikan Juara III	Orang	500.000	
	Hadiah Pembinaan Event Pendidikan Juara I	Tim	2.000.000	
	Hadiah Pembinaan Event Pendidikan Juara II	Tim	1.500.000	
	Hadiah Pembinaan Event Pendidikan Juara III	Tim	1.000.000	
8	Penunjang Admin Dapodik Kabupaten	Orang/Bulan	250.000	
9	Penunjang Admin Aplikasi Cash Management System Corporate (B)	Orang/Bulan	250.000	
10	Penunjang Admin Aplikasi Cash Management System Corporate (K)	Orang/Bulan	150.000	

15) Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Ahli Sandi	Orang/Bln	900.000	
2	Penanggung Jawab Pengaman Persandian	Orang/Bln	500.000	
3	Pendukung Persandian	Orang/Bln	300.000	
4	Jasa Konsultasi DISKOMINFOTIK	Paket	100.000.000	
5	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa Diskominfotik	Paket	60.000.000	
6	Belanja Kerjasama Publikasi Media Cetak	Per Tahun	50.000.000	
7	Belanja Kerjasama Publikasi Media Online	Per Tahun	30.000.000	
12	Pengelola Aplikasi SP4N Lapor	Org/Bulan	2.000.000	
13	Biaya Jasa Instalasi Acces Point dan Switch	Titik	250.000	
14	Biaya Jasa Instalasi dan Pengelolaan Server Virtual Machine	Paket	10.000.000	
15	Petugas Pengelola Domain dan Sub Domain PNS	Org/Bulan	1.000.000	
16	Petugas Pengelola Domain dan Sub Domain Non PNS	Org/Bulan	500.000	
17	Petugas Pengelola Jaringan Fiber Optic PNS	Org/Bulan	1.000.000	
18	Petugas Pengelola Jaringan Fiber Optic Non PNS	Org/Bulan	500.000	
19	Biaya Pengembangan Website SPBE	Paket	20.000.000	
20	Biaya Pembangunan dan Pengelolaan DNS Server	Paket	18.000.000	
21	Publikasi dan Informasi pada Media Cetak 4 kolom x 270 mm	Per Tayang	20.000.000	
22	Publikasi dan Informasi pada Media Cetak 3 kolom x 100 mmk	Per Tayang	3.500.000	
23	Training Fortgate-803	Pertemuan	2.000.000	
24	Publikasi (pariwara) pada media cetak (Serambi Awards)	Per Tahun	45.000.000	

25	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nagan Raya			
	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Wartawan PWI Kabupaten Nagan Raya	Per Tahun	50.000.000	
	Pelantikan Pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kabupaten Nagan Raya	Per Tahun	30.000.000	
26	Astinet Dedicated, Speed 45 Mbps	Per Bulan	20.850.000	
27	Instalasi dan Konfigurasi Router VPN	Paket	10.000.000	

16) Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Jasa Penyusunan Naskah Akademik	Naskah Akademik	15.000.000	
2	Honorarium Pengacara Swasta	Orang/Kegiatan	12.000.000	
3	Biaya Operasional Jaksa Pengacara Negara	Orang/Kegiatan	12.000.000	
4	Biaya Transportasi & Akomodasi Pengacara Swasta dan Jaksa Pengacara Swasta (JPN)	Orang/Kali	2.500.000	
5	Honorarium Tim Kuasa Hukum Khusus Pemda	Orang/Kali	2.000.000	

17) Bagian Keisra Setdakab Nagan Raya

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	S-3 Luar Negeri	Org/Kegiatan	2.500.000	
2	S-3 Luar Provinsi	Org/Kegiatan	3.600.000	
3	S-3 Provinsi	Org/Kegiatan	3.000.000	
4	S-2 Luar Negeri	Org/Kegiatan	2.500.000	
5	S-2 Luar Provinsi	Org/Kegiatan	2.500.000	
6	S-1 Luar Negeri	Org/Kegiatan	2.500.000	
7	S-1 Luar Provinsi	Org/Kegiatan	1.500.000	
8	S-1 Provinsi	Org/Kegiatan	1.000.000	
9	S-1 Kabupaten	Org/Kegiatan	750.000	
10	D-3 Luar Provinsi	Org/Kegiatan	1.000.000	
11	D-3 Provinsi	Org/Kegiatan	800.000	
12	D-3 Kabupaten	Org/Kegiatan	700.000	
13	Santri Modern SMA	Org/Tahun	500.000	
14	Santri Modern SMP	Org/Tahun	500.000	
15	Santri Salafi	Org/Tahun	500.000	
16	Anak Yatim	Org/Tahun	500.000	
17	Disabilitas	Org/Tahun	500.000	

18	Santunan Kematian			
	Tipe A	Org/Tahun	5.000.000	
	Tipe B	Org/Tahun	4.000.000	
	Tipe C	Org/Tahun	3.000.000	
	Tipe D	Org/Tahun	2.000.000	
	Tipe E	Org/Tahun	2.000.000	
24	Petugas Verifikasi Data Bantuan Sosial (THL)	Orang/Bulan	1.500.000	
25	Petugas Khusus lapangan Bagian Keisra (THL)	Orang/Bulan	1.500.000	

18) Bagian Humas dan Protokoler Setdakab

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Pengamanan Perjalanan Konvoi Pejabat/Tamu VIP	Org/Kali	2.500.000	

19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Petugas Pustaka	Orang/Bln	800.000	
2	Petugas SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis)	Orang/Bln	800.000	
3	Petugas JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	Orang/Bln	800.000	
4	Petugas Inlist (Integrated Library System)	Orang/Bln	800.000	
5	Sopir pustaka keliling (Pusling)	Orang/Bln	800.000	
6	Fungsional Pustakawan Utama	Orang/Bln	2.000.000	
7	Fungsional Pustakawan Madya	Orang/Bln	1.500.000	
8	Fungsional Pustakawan Muda	Orang/Bln	1.000.000	
9	Fungsional Pustakawan Pertama	Orang/Bln	900.000	
10	Fungsional Pustakawan Penyelia	Orang/Bln	800.000	
11	Fungsional Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Orang/Bln	650.00	
12	Fungsional Pustakawan Pelaksana	Orang/Bln	500.000	
13	Fungsional Arsiparis Utama	Orang/Bln	2.000.000	
14	Fungsional Arsiparis Madya	Orang/Bln	1.500.000	
15	Fungsional Arsiparis Muda	Orang/Bln	1.000.000	
16	Fungsional Arsiparis Pertama	Orang/Bln	900.000	
17	Fungsional Arsiparis Penyelia	Orang/Bln	800.000	
18	Fungsional Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Orang/Bln	650.000	
19	Fungsional Arsiparis Pelaksana	Orang/Bln	500.000	
20	Petugas Pengolahan buku	Orang/Buku	5.500	

21	Petugas Pengelola Naskah Kuno	Orang/Bln	500.000	
----	-------------------------------	-----------	---------	--

20) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No		Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Pelatih Cabang Olahraga	Orang/Bln	800.000	
2	Penjaga Pantai	Orang/Bln	800.000	
3	Operator Komputer	Orang/Bln	800.000	
4	Petugas Penjaga Lapangan Olahraga	Orang/Bln	800.000	
5	Penjaga Gedung Kebudayaan	Orang/Bln	800.000	
6	Penjaga Gedung Pemuda	Orang/Bln	800.000	
7	Hadiah dan Trophy Turnamen Bola Kaki	Org/Keg	40.000.000	
8	Hadiah dan Trophy Turnamen Bola Volly	Org/Keg	30.000.000	
9	Honorarium Wasit	Org/Hari	1.000.000	
10	Honorarium Lesmen	Org/Hari	750.000	
11	Honorarium IP Turnamen	Org/Hari	500.000	
12	Honorarium Anak Gawang	Org/Hari	200.000	
13	Honorarium Assisten Pelatih	Org/Keg	2.000.000	
14	Honorarium Oficial	Org/Keg	1.500.000	
15	Pemandu Bakat Olahraga	Org/Keg	3.000.000	
16	Belanja Kontribusi Organisasi Kepemudaan (OKP)			
	Kontribusi OKP I	Group	10.000.000	
	Kontribusi OKP II	Group	15.000.000	
	Kontribusi OKP III	Group	20.000.000	
17	Belanja Kontribusi Cabang Olahraga			
	Kontribusi Cabang Olahraga I	Group	10.000.000	
	Kontribusi Cabang Olahraga II	Group	15.000.000	
	Kontribusi Cabang Olahraga III	Group	20.000.000	
	Kontribusi Cabang Olahraga IV	Group	25.000.000	
	Kontribusi Cabang Olahraga V	Group	30.000.000	
	Kontribusi Cabang Olahraga VI	Group	40.000.000	
	Kontribusi Cabang Olahraga VII	Group	50.000.000	
17	Kontribusi Karantina Paskibra Kabupaten Nagan Raya	Kegiatan	100.000.000	
18	Honorarium Pengurus KONI			
	Ketua Umum	Orang/Bulan	700.000	
	Wakil Ketua Umum	Orang/Bulan	650.000	
	Sekretaris	Orang/Bulan	600.000	
	Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	550.000	
	Wakil Bendahara	Orang/Bulan	600.000	
	Ketua Bidang	Orang/Bulan	500.000	

	Wakil Ketua Bidang	Orang/Bulan	450.000	
	Anggota	Orang/Bulan	400.000	
19	Poding Atlit, Pelatih, Asisten Pelatih dan Official	Kegiatan	12.000	
20	Jaket Atlit	Lembar	275.000	
21	Pengadaan Perlengkapan Pertandingan Olahraga	Paket	195.270.000	
22	Paskibraka			
	Honor Tim Pelatih Paskibraka	Org/Kali	170.000	
	Honor Tim Pendamping Paskibraka	Org/Kali	150.000	
	Akomodasi/Penginapan Tim Pendamping Paskibraka	Hari	200.000	
	Transportasi Tim Pelatih Paskibraka	Org/Kali	50.000	
	Transportasi Peserta (TC) Paskibraka	Org/Hari	30.000	
	Transportasi Tim Seleksi Paskibraka	Org/Hari	125.000	

21) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No		Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Operator Pusdalops	Orang/Bln	1.000.000	
2	Petugas Jaga Gudang Logistik	Orang/Bln	1.000.000	
3	Petugas Peralatan Bencana	Orang/Bln	700.000	
4	Petugas Kebencanaan Kecamatan	Orang/Bln	700.000	
5	Piket petugas pemadam kebakaran	Org/Hari	25.000	
6	Piket petugas Pusdalops	Org/Hari	25.000	
7	Penyediaan Bahan Logistik Bencana	Paket	5.000.000	
8	Pengelola Gudang Logistik	Orang/Bln	500.000	
9	Mobilisasi Peralatan Bencana	Paket	10.000.000	
10	Satgas COVID 19 Nagan Raya			
	Ketua	Org/Bulan	1.200.000	
	Wakil Ketua	Org/Bulan	1.100.000	
	Sekretaris	Org/Bulan	1.000.000	
	Wakil Sekretaris	Org/Bulan	900.000	
	Ketua Sekretariat	Org/Bulan	900.000	
	Wakil Ketua Sekretariat	Org/Bulan	850.000	
	Ketua Tim Ahli	Org/Bulan	800.000	
	Wakil Ketua Tim Ahli	Org/Bulan	750.000	
	Ketua Bidang	Org/Bulan	700.000	
	Wakil Ketua Bidang	Org/Bulan	650.000	
	Anggota	Org/Bulan	600.000	
11	Satgas Kecamatan COVID 19 Nagan Raya			

	Ketua	Org/Bulan	500.000	
	Sekretaris	Org/Bulan	450.000	
	Bendahara	Org/Bulan	400.000	
	Anggota	Org/Bulan	350.000	
12	Petugas Kebersihan Posko Satgas COVID 19	Org/Hari	20.000	
13	Petugas Lapangan dan Pengelola Adminitrasi Keuangan Satgas COVID 19	Org/Hari	100.000	
14	Sopir Pemadam Kebakaran	Org/Bulan	1.200.000	
15	Anggota Pemadam Kebakaran	Org/Bulan	1.000.000	
16	Sopir Mobil Water Suply	Org/Bulan	1.200.000	
17	Anggota Mobil Water Suply	Org/Bulan	1.000.000	
18	Petugas Dapur Umum Bencana	Org/Bulan	1.000.000	

22) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Tenaga Ahli Bidang , Penelitian dan Pengembangan	Orang/Bln	5.000.000	
2	Fungsional Perencana Jenjang Pertama	Orang/Bln	1.250.000	
3	Fungsional Perencana Jenjang Muda	Orang/Bln	1.500.000	
4	Fungsional Perencana Jenjang Madya	Orang/Bln	1.600.000	
5	Fungsional Perencana Jenjang Utama	Orang/Bln	2.000.000	
6	Jasa Pihak Ke 3/ Jasa Konsultansi			
	Kajian Percepatan Pengembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya	Paket	10.000.000	
	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Nagan Raya	Paket	10.000.000	
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2021	Paket	15.000.000	
	Penyusunan Dokumen RAD Pangan dan Gizi	Paket	5.000.000	
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG)	Paket	15.000.000	
	Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Nagan Raya	Paket	30.00.000	
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Paket	15.000.000	

	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Terhadap Anak Putus Sekolah dan Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah	Paket	45.000.000	
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021	Paket	12.500.000	
	Penyusunan Database Jaringan Irigasi Tersier Kabupaten Nagan Raya	Paket	5.000.000	
	Feasibility Study (FS) Kawasan Industri Terpadu (KIT) Kabupaten Nagan Raya	Paket	5.000.000	
	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nagan Raya	Paket	85.000.000	
	Road Map Sistem Inovasi Daerah	Paket	100.000.000	
	Pembuatan video Profil Kabupaten Nagan Raya	Paket	30.000.000	
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Kabupaten Nagan Raya	Paket	12.000.000	
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Nagan Raya	Paket	12.000.000	
	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya	Paket	100.000.000	
	Penyusunan Kajian Pembentukan Akademi Perkebunan	Paket	100.000.000	
	Pembuatan Video Capaian Keberhasilan 5 Tahun Pemerintahan Jamin Idham-Chalidin Oesman	Paket	30.000.000	
	Laporan Pelaksanaan Aksi Daerah RANHAM	Paket	10.000.000	
9	Petugas Khusus Pengelola Aplikasi Pembangunan Daerah	Org/Bulan	2.000.000	
10	Asisten Khusus Pengelola Aplikasi Pembangunan Daerah	Org/Bulan	1.500.000	
11	Admin Kabupaten DAK KRISNA	Org/Bulan	1.000.000	
12	Petugas Pengelola DAK KRISNA OPD	Org/Bulan	750.000	
13	Petugas IT Pusdatin	Org/Bulan	3.000.000	
28	Petugas Penanggungjawab Data Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	Org/Bulan	500.000	

23) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
2	Petugas Fasilitator Lapangan HKP	Org/Bulan	1.500.000	
3	Penyusunan Kajian Teknis Pembentukan UPTD SPAM	Paket	56.990.000	
4	Biaya Jasa Pihak Ketiga Penyusunan rencana Pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022	Paket	300.000.000,-	

24) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Penjaga Toko Dekranas	Org/Bulan	700.000	
2	Perajin Industri kecil dan menengah	Org/Hari	150.000	
3	Biaya Restribusi Tera Ulang UUTP	Per tahun	4.000.000	
4	Belanja Bahan Subsidi Harga	Paket	5.000.000	
5	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Besar Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
	Honor Petugas Kecamatan Pasar Murah	Org/Kali	200.000	
	Subsidi Gula Pasir	Kg	2.000	
	Subsidi Minyak Goreng	Kg	2.000	
	Subsidi Syrup	Botol	2.000	
	Subsidi telur Ayam	Butir	350	
	Subsidi tepung terigu	Kg	2.000	
6	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa tera, tera ulang dan pengawasan			
7	Biaya Cap tanda tera	Kegiatan	2.000.000	
8	Bimbingan Teknis Kemetrologian Legal	Org/Kegiatan	16.000.000	
9	Pembangunan Pasar Serbajadi Kec. Darul Makmur			
	Biaya Pembangunan Pasar Serbajadi Kec. Darul Makmur	Paket	170.000.000	
	Tim Teknis Pembangunan Pasar Serbajadi Kec. Darul Makmur	Org/Bulan	1.500.000	
10	Sewa Toko Galeri UMKM	Per Tahun	25.000.000	
11	Pembentukan Kelompok Usaha Berbadan Hukum di Notaris	Kelompok	3.500.000	

25) SPNF SKB Kabupaten Nagan Raya

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Honorarium Tutor Rapai	Orang/Kali	1.833.000	
2	Biaya Personil Peserta Didik Non Kesetaraan			
	Pendidikan Kesetaraan (Paket A)	Orang	200.000	

	Pendidikan Kesetaraan (Paket B)	Orang	250.000	
	Pendidikan Kesetaraan (Paket C)	Orang	300.000	
3	Penyusunan Rencana Pembelajaran (RPP) untuk Kesetaraan Paket A,B,dan C			
	Kesetaraan Paket A 10 Mata Pelajaran	Materi	500.000	
	Kesetaraan Paket B 10 Mata Pelajaran	Materi	500.000	
	Kesetaraan Paket C 16 Mata Pelajaran	Materi	500.000	
4	Biaya Penyusunan program tahunan dan Semester Kesetaraan Paket A,B dan C	Org/Jam/ Pelajaran	100.000	
5	Penyiapan Dan Tindak Lanjut Evaluasi Pendidikan Non Formal Kesetaraan			
	Ujian Akhir Sekolah Kesetaraan Paket A	Tahun	1.000.000	
	Ujian Akhir Sekolah Kesetaraan Paket B	Tahun	1.500.000	
	Ujian Akhir Sekolah Kesetaraan Paket C	Tahun	1.500.000	
6	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal			
	Penyusunan Materi silabus Mata Pelajaran Muatan Lokal Rapai Saman	Bulan	1.000.000	
	Pemateri Silabus Mata Pelajaran Muatan Lokal Rapai Saman	Bulan	1.500.000	
	Ujian Materi Silabus Rapai Saman	Bulan	833.000	
7	Biaya Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Non Formal	Tahun	10.600.000	

26) Sekretariat DPRK

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Petugas Khusus Administrasi Sekretariat DPRK	Orang/bulan	1.500.000	
2	Biaya Pengamanan Kejadian Demonstrasi	Kali	25.000.000	
3	Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Perda/Qanun Inisiatif DPRK	Paket	15.000.000	
4	Honorarium Pengacara Negara/Advokasi Hukum Penanganan Kasus Perdata/Tata Usaha Negara	Perkara	50.000.000	
5	Management Of Training (MOT) BPSDM Aceh	Org/Jam	300.000	
6	Pemateri BIMTEK	Org/Jam	750.000	

27) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Petugas Agenda Dokumen Kependudukan	Org/Bulan	600.000	

2	Petugas Entry Data Capil	Org/Bulan	700.000	
3	Petugas Pencetakan Capil	Org/Bulan	700.000	
4	Petugas Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	Org/Bulan	700.000	
5	Petugas Cetak Kartu Indentitas Anak	Org/Bulan	700.000	
6	Petugas Entry dan Cetak Kartu Keluarga	Org/Bulan	700.000	

28) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Petugas Pelaporan SIKONDA Kabupaten	Org/Kali	2.000.000	
2	Petugas Pelaporan SIKONDA Kecamatan	Org/Kali	1.500.000	

29) Bagian Pemerintahan Setdakab

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
2	Biaya Jasa Konsultansi Pembuatan Peta Batas Desa	Per Desa	15.000.000	
3	Belanja Forum Komunikasi Kabupaten Se-Aceh (FKKA)	Paket	40.000.000	
4	Honorarium Forkopimda Kabupaten			
	Bupati	Org/Bulan	2.250.000	
	Ketua DPRK	Org/Bulan	2.250.000	
	Kapolres	Org/Bulan	2.250.000	
	Kajari	Org/Bulan	2.250.000	
	Dandim	Org/Bulan	2.250.000	
	Ketua Pengadilan Negeri	Org/Bulan	2.250.000	

30) Dinas Pertanahan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Koordinator Pengukuran dan Pemetaan	Orang/Kali	500.000	
2	Petugas Pengukuran dan Pemetaan	Orang/Kali	400.000	
3	Petugas Pendamping Pengukuran	Orang/Kali	300.000	
4	Petugas Administrasi dan Peralatan	Orang/Kali	300.000	
5	Biaya Pemeriksaan Tanah – Tim Peneliti Tanah Sertifikat Aset Pemkab Nagan Raya			
	Biaya Pemeriksaan Tanah Non Pertanian	M2	40	
	Biaya Pemeriksaan Tanah Pertanian	M2	20	
	Biaya Tim Peneliti Tanah	Persil	350.000	
7	Tenaga Ahli Pemetaan /Pengukuran	Org/Bulan	2.500.000	

O. HONORARIUM APARATUR PENDUKUNG LAINNYA

1) Honorarium Aparatur Mukim

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Imum Mukim	Orang/bulan	1.600.000	
2	Sekretaris Mukim	Orang/bulan	900.000	

2) Honorarium Lembaga Keistimewaan MPU

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Ketua MPU	orang/bulan	3.000.000	
2	Wakil Ketua MPU	orang/bulan	2.500.000	
3	Ketua Komisi	orang/bulan	1.100.000	
4	Dewan Kehormatan	orang/bulan	1.200.000	
5	Anggota Majelis	orang/bulan	850.000	
6	Ketua MPU Kecamatan	orang/bulan	500.000	
7	Sekretaris MPU Kecamatan	orang/bulan	400.000	

3) Honorarium Lembaga Keistimewaan MAA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Ketua MAA	orang/bulan	3.000.000	
2	Wakil Ketua MAA	orang/bulan	2.250.000	
3	Ketua Bidang	orang/bulan	1.250.000	
4	Anggota	orang/bulan	1.000.000	
5	Anggota Majelis	orang/bulan	750.000	
6	Ketua MAA Kecamatan	orang/bulan	500.000	
7	Sekretaris MAA Kecamatan	orang/bulan	400.000	
8	Pemangku Adat MAA			
	Ketua Pemangku Adat	orang/bulan	2.250.000	
	Wakil Ketua	orang/bulan	2.000.000	
	Sekretaris	orang/bulan	1.250.000	
	Anggota	orang/bulan	1.000.000	

4) Honorarium Lembaga Keistimewaan MPD

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Ketua MPD	orang/bulan	3.000.000	
2	Wakil Ketua MPD	orang/bulan	2.250.000	
3	Komisi	orang/bulan	1.500.000	
4	Anggota	orang/bulan	1.000.000	

5) Honorarium Lembaga Keistimewaan Baitul Mal

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Ketua Baitul Mal	orang/bulan	3.500.000	
2	Kepala Bidang Baitul Mal	orang/bulan	1.500.000	
3	Ketua Dewan Pengawas	orang/bulan	1.000.000	
4	Sub Bagian Baitul Mal	orang/bulan	1.000.000	
5	Sekretaris Dewan Pengawas	orang/bulan	800.000	
6	Anggota Dewan pengawas	orang/bulan	500.000	
7	Tenaga Profesional	orang/bulan	1.000.000	

6) Honorarium Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Ketua Pengawas	orang/bulan	1.000.000	
2	Sekretaris	orang/bulan	800.000	
3	Anggota Dewan Pengawas	orang/bulan	500.000	

7) Besaran Satuan Bantuan Zakat, Infaq Dan Sedeqah

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Fakir			
	Bantuan Rumah Fakir yang ada Tanggungan	Unit	87.500.000	
	Bantuan Langsung Konsumtif untuk Fakir	Orang	500.000	
2	Miskin			
	Bantuan Rumah Miskin yang ada Tanggungan	Unit	87.500.000	
	Bantuan langsung Konsumtif untuk Miskin	Orang	400.000	
	Amil			
	Bantuan Amil TIM Pendataan Mustahik Penerima ZIS	Kegiatan	60.00.000	
	Bantuan Amil TIM Penyaluran Dana ZIS	Kegiatan	90.000.000	
	Bantuan Amil TIM Verifikasi Rumah Fakir / Miskin	Kegiatan	15.000.000	
3	Muallaf			
	Bantuan Langsung Konsumtif untuk Muallaf	Orang	1.000.000	
4	Gharimin			
	Bantuan Langsung Pembayaran Utang Piutang Gharimin	Kegiatan	80.000.000	
5	Fisabilillah			
	Bantuan Konsumtif Tahfizd AL-Qur`an 20 Juz	Orang	1.500.000	
	Bantuan Konsumtif Tahfizd AL-Qur`an 30 Juz	Orang	2.000.000	
6	Ibnu Sabil			

	Bantuan untuk Ibnu Sabil Yang Menuntut Ilmu	Orang	500.000	
7	Infaq / Shadaqah & Dana Lainnya			
	Sumbangan untuk Anak Yatim Maulid Akbar	Kali	1.500.000	
	Hidangan Maulid Nabi Muhammad SAW	Kali	11.000.000	
	Publikasi Kegiatan Amil melalui Media Cetak, Elektronik	Kegiatan	3.000.000	
	Pengembalian UPZ Infaq CV,PT & Rekanan lainnya	Kali	18.000.000	
	Bantuan Konsuntif DED Rumah Fakir Miskin	Orang	5.000.000	
	Bantuan Konsuntif TIM Pengawasan Pembangunan Rumah	Orang	1.000.000	
	Bantuan Umum, Sosial, Keagamaan & Kegiatan Amil Lainnya	Paket	626.500.000	
	Insentif Ka. Baitul Mal Gampong Pendamping Penyaluran ZIS	Orang	500.000	
	Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf (Ikrar Wakaf)	Buah	500.000	
	Bantuan Teungku Pembina Muallaf	Orang	1.200.000	
	Bantuan Untuk Kegiatan Sosialisasi Melalui Khatib Jum'at	Orang	500.000	
	Bantuan Sewa/Pembersihan Tempat Penyaluran ZIS	Kali	500.000	


BUPATI NAGAN RAYA,

H.M. JAMIN IDHAM, SE

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
(ASB)
NOMOR : 900/ 260 /Kpts/2022
TANGGAL : 7 Juli 2022

Harga satuan untuk Analisa Standar Belanja (ASB) yang diatur dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kewajaran tingkat kemahalan regional di Kabupaten Nagan Raya untuk Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari :

1. KONSTRUKSI BANGUNAN

No	Uraian	Spek	Koef.	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Struktur Jalan (Timbunan Biasa)	Bidang Jalan PUPR	1	Meter	250.000	250.000
2.	Peningkatan Struktur Jalan (Timbunan Pilihan)	Bidang Jalan PUPR	1	Meter	300.000	300.000
3.	Peningkatan Struktur jalan (Lapisan AC-BC)	Bidang Jalan PUPR	1	Meter	3.000.000	3.000.000
4.	Peningkatan Kapasitas (Pelebaran Jalan)	Bidang Jalan PUPR	1	Meter	2.500.000	2.500.000
5.	Pembangunan Jalan (Pembukaan)	Bidang Jalan PUPR	1	Meter	100.000	100.000
6.	Pembangunan Jalan (Buka + Timbunan Biasa)	Bidang Jalan PUPR	1	Meter	350.000	350.000
7.	Pembangunan Jalan (Buka + Timbunan Pilihan)	Bidang Jalan PUPR	1	Meter	400.000	400.000
8.	Pergantian Jembatan	Bidang Jembatan PUPR	1	Meter	200.000.000	200.000.000
9.	Pembangunan Jembatan	Bidang Jembatan PUPR	1	Meter	180.000.000	180.000.000
10.	Pembangunan Saluran Irigasi Konstruksi Batu Kali	Bidang Pengairan PUPR	1	Meter	2.100.000	2.100.000
11.	Pembangunan Saluran Irigasi Konstruksi Wiremesh	Bidang Pengairan PUPR	1	Meter	2.500.000	2.500.000
12.	Pembangunan Saluran Irigasi Konstruksi Beton Bertulang	Bidang Pengairan PUPR	1	Meter	4.000.000	4.000.000
13.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Konstruksi Beton Cor	Bidang Pengairan PUPR	1	Meter	1.000.000	1.000.000
14.	Pembangunan Normalisasi Saluran Pembuang	Bidang Pengairan PUPR	1	Meter	120.000	120.000
15.	Pembangunan Normalisasi Sungai	Bidang Pengairan PUPR	1	Meter	800.000	800.000

No	Uraian	Spek	Koef.	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
16.	Pembangunan Pengaman Tebing Konstruksi Batu Armor	Bidang Pengairan PUPR	1	Meter	7.000.000	7.000.000
17.	Pembangunan Pengaman Tebing Konstruksi Tripod/ Tetrapod	Bidang Pengairan PUPR	1	Meter	12.000.000	12.000.000
18.	Pembangunan Pengaman Tebing Konstruksi Bronjong Pabrik	Bidang Pengairan PUPR	1	Meter	4.500.000	4.500.000
19.	Pembangunan Bendung Bronjong	Bidang Pengairan PUPR	1	Meter	11.000.000	11.000.000
20.	Pembangunan Bendung Beton Bertulang	Bidang Pengairan PUPR	1	Meter	65.000.000	65.000.000
21.	Pembangunan Bendung Batu Armor	Bidang Pengairan PUPR	1	Meter	22.000.000	22.000.000
22.	Pembangunan Bangunan Bagi/ Sadap	Bidang Pengairan PUPR	1	Unit	200.000.000	200.000.000
23.	Pembangunan Box Culvert	Bidang Pengairan PUPR	1	Unit	100.000.000	100.000.000
24.	Pembangunan Talang/ Syphone	Bidang Pengairan PUPR	1	Meter	3.000.000	3.000.000
25.	Pembangunan Trash Rack	Bidang Pengairan PUPR	1	Unit	20.000.000	20.000.000
26.	Bangunan Gedung Tidak Sederhana	Bidang Gedung Bangunan	1	M2	6.750.000	6.750.000
27.	Bangunan Gedung Sederhana	Bidang Gedung Bangunan	1	M2	5.240.000	5.240.000
28.	Rumah Type A	Bidang Gedung Bangunan	1	M2	5.070.000	5.070.000
29.	Rumah Type B	Bidang Gedung Bangunan	1	M2	4.980.000	4.980.000
30.	Rumah Type C,D,E	Bidang Gedung Bangunan	1	M2	4.110.000	4.110.000
31.	Pagar Gedung Depan T 1,5 M	Bidang Gedung Bangunan	1	M1	2.400.000	2.400.000
32.	Pagar Gedung Belakang T 3 M	Bidang Gedung Bangunan	1	M1	2.040.000	2.040.000
33.	Pagar Gedung Samping T 2 M	Bidang Gedung Bangunan	1	M1	1.970.000	1.970.000
34.	Pagar Rumah Depan T 1,5 M	Bidang Perumahan	1	M1	2.220.000	2.220.000
35.	Pagar Rumah Belakang T 2,5 M	Bidang Perumahan	1	M1	1.290.000	1.290.000
36.	Pagar Rumah Samping T 2 M	Bidang Perumahan	1	M1	1.250.000	1.250.000
37.	Rabat Beton Tulangan T 10-20 Cm	Bidang Sarana dan Prasarana	1	M2	350.000	350.000

No	Uraian	Spek	Koef.	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
38.	Rabat Beton Tulangan T 20-30 Cm	Bidang Sarana dan Prasarana	1	M2	480.000	480.000
39.	Timbunan Tanah Biasa	Bidang Sarana dan Prasarana	1	M3	420.000	420.000
40.	Pekerjaan Eksterior Gedung Kantor	Bidang Gedung Bangunan	1	M2	2.750.000	2.750.000
41.	Pekerjaan Interior Gedung dan Rumah	Bidang Gedung Bangunan	1	M2	3.250.000	3.250.000
42.	Pekerjaan Pemasangan Paving Blok	Bidang Gedung Bangunan	1	M2	325.000	325.000
43.	Pekerjaan Pemasangan Lantai Batu Giok+Pemasangan	Bidang Gedung Bangunan	1	M3	7.232.600	7.232.600
44.	Pembangunan Drainase Lingkungan Beton Bertulang	Bidang Sarana dan Prasarana	1	M1	1.650.000	1.650.000
45.	Pembangunan Drainase Lingkungan Pasangan Batu	Bidang Sarana dan Prasarana	1	M1	950.000	950.000
46.	Pembangunan Sumur Bor Dalam Kapasitas 2L/Det	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Unit	6.500.000	6.500.000
47.	Pembangunan Sumur Bor Dalam Kapasitas 2L/Det + Tower + Jaringan	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Unit	340.000.000	340.000.000
48.	Sumur Bor Dangkal	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Unit	65.000.000	65.000.000
49.	Memasang Pipa PVC AW 50 mm, S-12,5 RRJ	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Meter	84.000	84.000
50.	Memasang Pipa PVC AW 75 mm, S-12,5 RRJ	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Meter	123.000	123.000
51.	Memasang Pipa PVC AW 100 mm, S-12,5 RRJ	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Meter	226.500	226.500
52.	Memasang Pipa PVC AW 150 mm, S-12,5 RRJ	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Meter	311.300	311.300
53.	Memasang Sambungan Rumah	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Unit	750.000	750.000
54.	Memasang Pipa GIP Medium Class 150 mm	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Meter	533.500	533.500
55.	Memasang Pipa GIP Medium Class 100 mm	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Meter	348.900	348.900
56.	Memasang Pipa GIP Medium Class 75 mm	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Meter	271.900	271.900
57.	Memasang Pipa GIP Medium Class 50 mm	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Meter	201.100	201.100
58.	Pembelian Tawas	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Kg	19.000	19.000
59.	Kaporit	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Kg	40.000	40.000

No	Uraian	Spek	Koef.	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
60.	Perbaikan Pipa Bocor 50	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Titik	252.000	252.000
61.	Perbaikan Pipa Bocor 75	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Titik	369.000	369.000
62.	Perbaikan Pipa Bocor 100	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Titik	679.500	679.500
63.	Perbaikan Pipa Bocor 150	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Titik	933.900	933.900
64.	Perbaikan Gate Valve 50	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Buah	900.000	900.000
65.	Perbaikan Gate Valve 75	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Buah	1.500.000	1.500.000
66.	Perbaikan Gate Valve 100	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Buah	2.500.000	2.500.000
67.	Perbaikan Gate Valve 150	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Buah	4.500.000	4.500.000
68.	Sharing Kegiatan Fisik Pamsimas Gampong Bantan	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Paket	199.000.000	199.000.000
69.	Sharing kegiatan Fisik pamsimas Gampong Batu Raja	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Paket	202.000.000	202.000.000
70.	Sharing Kegiatan Fisik Pamsimas Gampong Alue Bata	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Paket	199.000.000	199.000.000
71.	Sharing Kegiatan Fisik Pamsimas Gampong Gunong Reubo	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Paket	199.000.000	199.000.000
72.	Sharing Kegiatan Fisik Pamsimas Gampong Alue Labu	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Paket	181.000.000	181.000.000
73.	Sharing Kegiatan Fisik Pamsimas Gampong Alue Buloh Kec. Seunagan	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Paket	245.000.000	245.000.000
74.	Sharing Kegiatan Fisik Pamsimas Gampong Gunong Kupok Kec. Tadu Raya	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Paket	245.000.000	245.000.000
75.	Sharing Kegiatan Hibah Khusus Pamsimas (HKP) Gampong Alue Rambot Kec. Darul Makmur	Bidang Sarana dan Prasarana	1	Paket	187.500.000	187.500.000

2. KONSTRUKSI JALAN

No	Uraian	Spek	Koef.	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan	1	M3	35.000	35.000
2.	Pembangunan Dam Parit	Pembangunan	1	M3	2.200.000	2.200.000
3.	Pembangunan Pintu Air	Pembangunan	1	M3	2.200.000	2.200.000
4.	Pembangunan Embung	Pembangunan	1	M3	2.200.000	2.200.000

No	Uraian	Spek	Koef.	Satuan	Harga	Jumlah
5.	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Pembangunan	1	M3	130.000	130.000
6.	Rehabilitasi Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Pembangunan	1	M3	1.800.000	1.800.000
7.	Rehabilitasi Pembangunan Dam Parit	Pembangunan	1	M3	1.800.000	1.800.000
8.	Rehabilitasi Pembangunan Embung	Pembangunan	1	M3	1.800.000	1.800.000
9.	Lening Jalan Usaha Jalan Usaha Tani	Pembangunan	1	M3	1.500.000	1.500.000

3. KONSTRUKSI TOWER

No	Uraian	Spek	Koef.	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pembangunan Bak Tandon/ Pemijahan	Bidang Kelautan	1	M2	1.600.000	1.600.000
2.	Pembangunan Lantai Jemur	Bidang Kelautan	1	M2	1.300.000	1.300.000
3.	Tower Menara Air Baja Bulat	Pembangunan Fisik	1	M2	25.000.000	25.000.000



 BUPATI NAGAN RAYA,

 H.M. JAMIN IDHAM, SE

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN (HSPK)
NOMOR : 900/ 260 /Kpts/2022
TANGGAL : 7 Juli 2022

Harga satuan untuk Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang diatur dalam Lampiran IV Keputusan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional di Kabupaten Nagan Raya untuk Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari :

1. PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

No	Uraian	Spek	Koef	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemeliharaan berkala Jalan	Bidang Jalan PUPR	1	Meter	800.000	800.000
2.	Rehabilitasi Jalan	Bidang Jalan PUPR	1	Meter	500.000	500.000
3.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Bidang Jalan PUPR	1	Meter	30.000	30.000
4.	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Bidang Jembatan PUPR	1	Meter	30.000.000	30.000.000
5.	Rehabilitasi Jembatan	Bidang Jembatan PUPR	1	Meter	50.000.000	50.000.000
6.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Bidang Jembatan PUPR	1	Meter	5.000.000	5.000.000
7.	Pemeliharaan dan Perbaikan Darurat Jaringan Irigasi	Bidang Pengairan PUPR	1	Meter	1.000.000	1.000.000
8.	Pemeliharaan dan Perbaikan Darurat Sungai	Bidang Pengairan PUPR	1	Meter	1.000.000	1.000.000

2. REHAB GEDUNG

No	Uraian	Spek	Koef	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehab Bangunan Gedung Berat	Bidang Gedung Bangunan	1	M2	3.285.000	3.285.000
2.	Rehab Bangunan Gedung Sedang	Bidang Gedung Bangunan	1	M2	1.642.500	1.642.500
3.	Rehab Bangunan Gedung Ringan	Bidang Gedung Bangunan	1	M2	985.500	985.500
4.	Rehab Rumah Berat	Bidang Perumahan	1	M2	2.535.000	2.535.000
5.	Rehab Rumah Sedang	Bidang Perumahan	1	M2	1.267.500	1.267.500
6.	Rehab Rumah Ringan	Bidang Perumahan	1	M2	760.500	760.500


3. PEMELIHARAAN LAINNYA

No	Uraian	Spek	Koef	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemeliharaan dan Penataan Hutan Kota	Pemeliharaan	1	Tahun	50.000.000	50.000.000
2.	Pemeliharaan Taman Media Jalan Ujong Fatimah - SP.4	Pemeliharaan	1	Tahun	150.000.000	150.000.000
3.	Pemeliharaan Alun-Alun Suka Makmue	Pemeliharaan	1	Tahun	50.000.000	50.000.000
4.	Pemeliharaan Median Jalan Median Jalan Utama	Pemeliharaan	1	Tahun	50.000.000	50.000.000
5.	Pemeliharaan Taman Ratu Balqis	Pemeliharaan	1	Tahun	50.000.000	50.000.000
6.	Pemeliharaan Taman Air Mancur	Pemeliharaan	1	Tahun	25.000.000	25.000.000
7.	Pemeliharaan Biren Jalan Lingkar Kota Suka Makmue	Pemeliharaan	1	Tahun	100.000.000	100.000.000
8.	Pengeboran Lapisan Aspal Pada Titik Bibit Pohon	Pemeliharaan Taman RTH	1	Titik	350.000	350.000
9.	Pengupasan Lapisan Rumput Lama / Pembersihan / Pembuangan	Pemeliharaan Taman RTH	1	M2	6.500	6.500
10.	Pembersihan (Potong/Babat)	Pemeliharaan Taman RTH	1	M2	354	354
11.	Penyemprotan Pestisida/Gulma (Termasuk Bahan)	Pemeliharaan Taman RTH	1	M2	150	150
12.	Timbunan Tanah Humus	Pemeliharaan Taman RTH	1	M2	147.100	147.100
13.	Pagar Sementara Rangka Kayu Klas II + Kawat Rocket	Pemeliharaan	1	M1	85.000	85.000
14.	Pengecatan Pagar Sementara (Residu/ter)	Pemeliharaan	1	M1	7.500	7.500
15.	Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	Pemeliharaan	1	LS	500.000.000	500.000.000

4. PEMELIHARAAN SARANA KANTOR LAINNYA

No	Uraian	Spek	Koef	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemeliharaan Videotron	Belanja Pemeliharaan	1	Unit / Tahun	25.000.000	25.000.000
2.	Pemasangan Lampu PJU jenis LED	Rehabilitasi	1	Ls	172.184.000	172.184.000
3.	Rehab lampu Taman/Jalan hemat Energi	Rehabilitasi	1	Ls	23.426.700	23.426.700
4.	Rehab Lampu PJU	Rehabilitasi	1	Ls	77.352.000	77.352.000
5.	Pergantian Lampu PJU jenis LED siap pasang	Rehabilitasi	1	Unit	4.500.000	4.500.000
6.	Rehab Sarana dan Prasarana PJU	Rehabilitasi	1	Ls	100.000.000	100.000.000

No	Uraian	Spek	Koef	Satuan	Harga	Jumlah
7.	Rehab Ringan Kursi Kerja	Pemeliharaan	1	Unit	165.000	165.000
8.	Rehab Sedang Kursi Kerja	Pemeliharaan	1	Unit	220.000	220.000
9.	Rehab Ringan Kursi Sofa/ Mebel	Pemeliharaan	1	Set	1.100.000	1.100.000
10.	Rehab Sedang Kursi Sofa/ Mebel	Pemeliharaan	1	Set	3.850.000	3.850.000
11.	Rehab Sedang Meja Kerja	Pemeliharaan	1	Unit	220.000	220.000


 BUPATI NAGAN RAYA, 
 H.M. JAMIN IDHAM, SE